

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PENUNTASAN
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
DI ERA OTONOMI DAERAH**



**DISUSUN OLEH
MAHYUNI
NIM: 015772031**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
2012**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul : Peran Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Era Otonomi Daerah, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Mataram, 25 Juli 2012
Yang menyatakan,



MAHYUNI
NIM. 015772031

ABSTRAK**Peran Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Lombok Barat
Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Di Era Otonomi Daerah****Mahyuni****Universitas Terbuka****mahyuniutgs@ymail.com**

Kata kunci : Peran Strategis, Wajib Belajar, Otonomi Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis renstra, implementasi kebijakan, pelaksanaan strategi serta faktor pendorong dan penghambat pada upaya mensukseskan wajib belajar sembilan tahun yang menjadi fungsi utama dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat. Perhatian atas aspek tersebut, karena Kabupaten Lombok Barat masih mempunyai permasalahan mendasar dalam sektor pendidikan.

Desain penelitian yang digunakan dengan penelitan kualitatif. Sumber data dengan menggunakan data dokumentasi dan hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Dikpora Lobar dan informan lainnya, di antaranya adalah anggota dewan. Analisis dengan mengedepankan kemampuan dalam melakukan deskripsi analitik atas temuan, serta menggunakan analisis FFA.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah kebijakan dan program yang dijalankan tidak bersifat spesifik atau dapat dinyatakan sebagai rutinitas, karena tidak terlihat orientasi untuk menyukseskan wajar dikdas sembilan tahun. Kebijakan dan program yang dijalankan adalah meningkatkan mutu dan rehab bangunan, pengembangan sekolah (SD/MI, SMP/MTs dan pendidikan pra sekolah) serta biaya operasional. Dilihat dari aspek alokasi dana, Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat telah memberikan perhatian yang tinggi pada penuntasan wajar dikdas sembilan tahun. Hal yang menjadi masalahnya adalah program kerja dan adanya permasalahan yang tidak menjadi kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat memberikan kontribusi atas tingginya angka *drop out*. Faktor pendorong untuk suksesnya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun adalah adanya komitmen bersama, perundangan, otonomi pengelolaan dana dan manajemen. Adapun faktor penghambatnya berupa perilaku, kemiskinan, topografi dan implementasi pendidikan.

Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah daerah perlu memberikan arahan kerja, dapat juga dalam peraturan daerah agar dapat memberikan kontribusi pada upaya menyelesaikan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat. Berhubungan dengan kerja tersebut sebagai sentral koordinasi dijalankan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Konteks ini meminjam kebijakan yang ditempuh pada era orde baru dalam menyelesaikan program yang esensial

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

The Strategic Role of Education And Youth Sports Departement West Lombok Regency to Completion Nine Years Education In The Era of Regional Autonomy

Mahyuni
Indonesian Open University
mahyuniutgs@ymail.com

Key words: Strategic Role, Compulsory Education, Autonomous Region

This study aims to describe and analyze the strategic planning, policy and strategy implementation, the factors driving and inhibiting the success of the efforts of nine-year compulsory education. Attention to aspects serve targeted, has fundamental problems education in West Lombok Regency.

The study design used with qualitative research. Data sources using documentation and interviews with officials at the Education Departement and other informants. Analysis with analytical description and FFA analysis.

An important finding of this study was carried out policies and programs that are not specific or can be expressed as a routine, because it does not look natural orientation for a successful nine-year basic education. Policies and programs is to improve the quality of school building and increase the operational costs. An examination of the allocation of funds, has given high attention to the completion of nine-year compulsory education. The problem is the program of work and other problems public organization.. Driving factor for a successful completion of compulsory nine years is commitment, legislation, fund management and management autonomy. The inhibiting factor in the form of behavior, poverty, topography and implementation of education.

Local governments need to provide job referrals, may also in local legislation in order to contribute to efforts to succeed normal nine-year basic education in West Lombok Regency. Coordination with other public organization is important to solved the esential problem.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Peran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Era Otonomi Daerah

Penyusun TAPM : MAHYUNI
NIM : 015772031
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juli 2012

Mengetahui :

Pembimbing I



Dr. Sofjan Aripin
 NIP.19660619/199203 1 002

Pembimbing II



Dr. Mansur Afifi
 NIP.19680410 199303 1 002

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/
 Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si
 NIP 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 002



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : MAHYUNI
NIM : 015772031
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Peran Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Era Otonomi Daerah

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/tanggal : Kamis, 6 September 2012
Waktu : Pk. 15.00 – 17.00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Drs. H.Kesipuddin, M.Pd

Penguji Ahli : Andi Fefta Wijaya, MDA., Ph.D

Pembimbing I : Dr. Sofjan Aripin

Pembimbing II : Dr. Mansur Afifi

The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed on a horizontal line. The signatures are written in a cursive style. A large blue diagonal watermark reading 'UNIVERSITAS TERBUKA' is overlaid across the entire page, including the signatures.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai fungsi dan tugas menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aset negara, dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan ayat 2 "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang". Dalam Undang-undang (UU) RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur mengenai sistem pendidikan di Indonesia, meliputi hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, termasuk juga dalam konsep pendanaannya.

Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003, ditegaskan mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan, ditegaskan pelaksanaannya tanpa diskriminasi dan dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat. Makna penting dari diskriminasi ini sangat luas, misalnya perolehan pendidikan tidak atas dasar kemampuan ekonomi masyarakat (kaya dan miskin). Fakta empiris yang ada, tentu masih jauh karena dalam perolehan pendidikan kesempatan bagi masyarakat kaya jauh lebih tinggi dibandingkan bagi masyarakat miskin, terlebih dengan adanya sistem sekolah unggulan yang mengenakan biaya tinggi, sistem undangan dan praktek lainnya yang pada dasarnya menerapkan diskriminasi.

Pasal 34 dijelaskan mengenai wajib belajar, ayat 2 menegaskan wajib belajar minimal untuk jenjang pendidikan dasar. Adapun pendidikan dasar pada pasal 17

dijelaskan meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah lanjutan pertama. Berdasarkan amanat UU tersebut, wajib belajar ditindaklanjuti dengan implementasinya melalui wajib belajar sembilan tahun, sebagai proses pendidikan yang wajib ditempuh oleh masyarakat dengan umur minimal mulai pada umur enam tahun.

Uraian tersebut memberikan gambaran atas cita-cita pendidikan nasional yang dijadikan dasar kerja bagi setiap daerah dan selanjutnya kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara langsung atau tidak langsung tujuan dari pengelolaan pendidikan tersebut untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, selanjutnya sebagai input untuk berbagai aktivitas pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan bagi masyarakat. Dalam menciptakan tujuan bersama ini, setiap SKPD saling mendukung dalam pewujudan tujuan tersebut, berkoordinasi dan terciptanya integritas semua pihak, antar fungsi, baik lintas daerah ataupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pasal 2 UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Dalam makna lanjutan bahwa perencanaan pembangunan harus bersifat terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak berjalan sendiri. Konteks sudah tegas, bahwa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan pusat, selanjutnya dijadikan acuan oleh setiap SKPD dalam menyusun rencana kerjanya.

Makna koordinasi, sinergitas dan integrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bukan dalam makna dijalankan dengan cara yang sama, tetapi tergantung pada permasalahan dan potensi yang dihadapi oleh daerah. Konteks

ini jelas dalam makna otonomi daerah, bahwa setiap daerah mempunyai permasalahan dan potensi sendiri. Untuk itu, setiap daerah memerlukan strategi dan aplikasi yang bersifat spesifik pula. Peran SKPD sangat strategis dalam penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk memecahkan permasalahan bangsa maupun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Nasirin (2010:5) mengindikasikan pada era otonomi daerah masalah kesejahteraan sebagai indikasi rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi permasalahan besar, jika tidak cepat diatasi akan menjadi bumerang dalam kehidupan bernegara. Fakta ini dapat ditunjukkan pada kondisi Kabupaten Lombok Barat, sebagai pemerintahan yang telah cukup lama di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil perhitungan implikasi pembangunan manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) ternyata berada pada posisi nomor dua terendah di Provinsi NTB (BPS NTB, 2009). Adapun kondisi Provinsi NTB jika dibandingkan dengan regional lain berada pada posisi nomor dua dari bawah tersebut Provinsi Papua dalam capaian IPM.

IPM terdiri atas tiga sektor, yaitu sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sektor pendidikan di Kabupaten Lombok Barat berada pada urutan 445 dari 457 kabupaten di Indonesia (BPS NTB, 2009). Pada aspek pendidikan tersebut terdapat pengukuran pada tiga aspek, yaitu angka melek huruf (AMH) 73,77 persen, rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 5,66 tahun dan persentase DO sebesar 8,82 persen. Fakta ini perlu dijadikan sebagai isu strategis dalam pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, jika tidak diterapkan strategi yang inovatif, maka posisinya akan selalu

menjadi yang terendah. Pada sisi lain, otonomi daerah pada dasarnya dijalankan untuk membangun penciptaan daya saing pada setiap daerah.

Strategi yang dibangun Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada periode 2004-2009 adalah penciptaan profesionalisme pelaku pendidikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Penegasan strategi tersebut dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat 2005-2009). Pada periode lima tahun terakhir telah diberikan penegasan peran Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, perlu dilakukan kajian evaluasi dan strategi yang kembali dibangun pada kerja lima tahun lanjutan.

Strategi yang diterapkan dalam lima tahun terakhir ini masih menyisakan permasalahan mendasar dalam sektor pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Data periode 2008/2009 menunjukkan angka partisipasi sekolah siswa SMP (APM/angka partisipasi murni) sederajat hanya sebesar 70,13%, berarti jumlah penduduk yang berada pada usia tersebut yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pada jenjang SMP sebanyak 29,87%. Adapun pada APM tingkat SD sebesar 88,39%, berarti terdapat sebanyak 11,61% anak yang mengalami putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar tersebut (BPS NTB, 2009).

Berdasarkan data tersebut, pada dasarnya pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih mempunyai permasalahan dasar pada sektor pendidikan, yaitu realisasi wajib belajar sembilan tahun. Pendidikan dasar masyarakat harus dituntaskan untuk dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu menjadi pendidikan sebagai alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat terserap di lapangan pekerjaan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan, jika mempunyai pendidikan

lebih tinggi dari pendidikan dasar. Peningkatan rencana pencapaian tujuan harus atas dasar pondasi yang kuat dalam masyarakat, yaitu pendidikan sembilan tahun tuntas.

Terdapat banyak indikator lain yang menjadikan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pembenahan atas strategi yang ditempuh, dengan cara mengenali faktor pendukung dan pendorong dari pelaksanaan fungsinya. Dihubungkan dengan aspek keuangan, peran dari Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat adalah melakukan pengusulan dana yang memadai untuk setiap strategi yang dibangun. Fakta yang ditemukan, pada periode 2008/2009 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp.28.218.883.662,00 atau menurun sebesar Rp.209.982.200.620,26 dari anggaran tahun 2007/2008 sebesar Rp.238.201.084.282,26. Penurunan anggaran yang dikelola Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat ekuivalen dengan penurunan program dalam menjalankan strategi (BPS NTB, 2009).

Penurunan nilai anggaran Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat memberikan informasi yang luas, terkait juga dengan perhatian pemerintah dan DPRD Kabupaten Lombok Barat. Hal yang jelas pada periode tersebut terjadi penyempitan wilayah kerja, karena terjadi pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memberikan perhatian pada aspek pendidikan tercermin dari kerja SKPD terkait, yaitu Dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

Kondisi terakhir ini dikhawatirkan berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat atau dipastikan akan mengalami keteringgalan pencapaian hasil pembangunan sumber daya manusia dengan daerah otonom lainnya. Penelitian ini diarahkan untuk

melakukan analisis peran strategis Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam pembangunan SDM, secara spesifik pada penuntasan permasalahan yang ada pada wajib belajar sembilan tahun.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan berdasarkan latar belakang yang belum dituntaskan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat berhubungan dengan penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas, selanjutnya bermuara pada keterlibatannya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Identifikasi masalah tersebut dapat dicarikan solusi dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat periode 2010-2014 dalam penuntasan wajar sembilan tahun?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam penuntasan wajar sembilan tahun?
3. Bagaimana pelaksanaan strategi alokasi dana untuk wajar sembilan tahun oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat?
4. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan kajian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat periode 2010-2014 dalam penuntasan wajar sembilan tahun.
2. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam penuntasan wajar sembilan tahun.
3. Menganalisis pelaksanaan strategi alokasi dana untuk wajar sembilan tahun oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat?
4. Menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoretis untuk memperdalam dan sekaligus meningkatkan khazanah pengetahuan dalam bidang pemerintahan otonomi daerah secara spesifik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara praktek menjadi masukan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat dalam merumuskan strategi pembangunan sumber daya manusia, secara spesifik melalui aspek pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu yang relevan dengan peran otonomi daerah dan SKPD dalam menciptakan kondisi yang berbeda dengan periode sebelumnya. Konsep penelitian terdahulu ada yang bersifat umum dalam pengelolaan keuangan dan ada juga khusus kajian pada SKPD tertentu. Penelitian terdahulu yang ditampilkan juga berhubungan dengan pendidikan, khususnya kajian mengenai wajar sembilan tahun.

Siregar (2010) melakukan penelitian dengan judul "Studi Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandar dan Madrasah Ibtidaiyah PUI Cendono Kandat Kediri-Jawa Timur)". Penerapan wajar sembilan tahun seyogyanya tidak hanya memperhatikan aspek secara kuantitas, tetapi perhatian atas kualitas pembelajaran. Ruang lingkup penelitian ini berada dua tingkat pendidikan, yaitu MTs dan MI, selanjutnya diberikan perhatian pada keberhasilan wajar sembilan tahun dari aspek kuantitatif dan kualitatif.

Tujuan permasalahan yang dirumuskan adalah :

1. Mengukur seberapa jauh tingkat kontribusi madrasah dalam menampung anak usia pendidikan dasar.
2. Mengukur tingkat efisiensi siswa madrasah.
3. Mengidentifikasi latar belakang keluarga siswa madrasah
4. Mengukur ketersediaan dana dan tenaga edukatif madrasah.
5. Mengidentifikasi pelaksanaan manajemen pendidikan di tingkat sekolah dasar.
6. Mengidentifikasi pelaksanaan pendidikan budi pekerti.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), jadi lebih mengandalkan temuan peneliti dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Simpulan yang diperoleh adalah dalam lingkup wilayah Kandat peran dari dua madrasah tersebut dalam menyerap anak usia sekolah dasar tergolong cukup besar. Pemberdayaan madrasah sangat diperlukan, diperlukan kerja yang kreatif dan inovatif. Adanya potensi yang cukup baik di wilayah terkait dapat menjadi potensi besar bagi sekolah dalam memperoleh pembiayaan, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kondisi tenaga pengajar dan sarana prasarana pembelajaran di dua madrasah yang dijadikan sebagai subyek penelitian dapat berjalan, walaupun pada taraf yang masih minimal. Penelitian tersebut memberikan fokus pada peran masyarakat dan internal sekolah dalam mendukung wajar sembilan tahun. Tentu berbeda dengan penelitian ini, sebagai subyek penelitian utamanya adalah para pengambil keputusan, terkait dengan keberadaannya di lembaga pemerintahan (SKPD).

Hanye, dkk (2010) melakukan penelitian dengan judul "Akseibilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas dan Sangau Kalimantan Barat". Tujuan yang dirumuskan adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan atas wajar dikdas sembilan tahun. Penelitian didesain dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam menuntaskan wajar sembilan tahun tergolong masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan sosial-budaya, ekonomi, geografis dan demografi. Kasus yang ditemukan untuk aspek sosial budaya adalah terjadinya nikah dini, pengaruh lingkungan dan minat untuk sekolah yang

rendah. Adapun aspek ekonomi dengan alasan kemiskinan, selanjutnya beralih menjadi pendukung ekonomi keluarga sebagai TKW atau bekerja membantu keluarga dengan menjadi buruh di sektor perkebunan. Aspek geografis terkait dengan lokasi perumahan yang jauh dengan sekolah dan akibat hal tersebut banyak anak yang telah melampaui umur belum menempuh pendidikan dasar.

Dua penelitian tersebut dilakukan pada subyek dari wajar dikdas, yaitu masyarakat sebagai sumber anak yang berada pada usia sekolah wajar sembilan tahun. Adapun dalam penelitian ini fokus pada peran pemerintah melalui SKPD dalam memecahkan masalah wajar sembilan tahun. Untuk itu, ditampilkan kondisi organisasi publik pada era otonomi daerah.

Koyan, dkk (1998) melakukan penelitian dengan judul "Identifikasi dan Pemetaan Peserta Didik Usia wajib Belajar 9 Tahun yang Putus Sekolah dan yang Tidak Melanjutkan Ke Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) di Kabupaten Buleleng; Suatu Penelitian Kebijakan". Penelitian ini dirancang dengan empat tujuan, yaitu mendiskripsikan peserta didik usia wajar 9 tahun yang belum menuntaskan wajarnya, tempat kerja dan jenis pekerjaan peserta didik usia wajar 9 tahun, menemukan faktor penyebab tidak tuntasnya wajar 9 tahunnya serta menemukan faktor yang dibutuhkan untuk menuntaskan wajar 9 tahunnya.

Desain riset dengan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di sembilan desa di Kabupaten Buleleng. Temuan dalam penelitian ini adalah 168 orang anak tidak pernah sekolah, ditambah dengan jumlah anak yang tidak melanjutkan ke SLTP. Anak usia wajar 9 tahun yang tidak bersekolah melakukan pekerjaan di desa sendiri, dengan jenis pekerjaan beternak, menganyam, pembantu rumah tangga dan

berbagai pekerjaan informal lainnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah adalah alasan ekonomi, sosial, budaya dan geografis serta aspirasi pendidikan yang rendah. Dibutuhkan keterampilan dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah penuntasan wajar dikdas.

Konteks terakhir perlu mendapatkan perhatian, dalam makna untuk memberikan solusi pada anak putus sekolah agar mempunyai pekerjaan yang lebih baik atau dilakukan di luar jam sekolah dengan komitmen melanjutkan pendidikan. Aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian atas kajian riset ini adalah meningkatkan aspirasi masyarakat atas pendidikan, bukan dengan memberikan solusi jangka pendek.

Meydianawathi (2010) melakukan penelitian dengan judul "Kajian Pendidikan Dasar: Pembangunan Manusia Berkualitas Dalam Millineum Developments Goals (MDGs) 2015". Penelitian ini sebatas kajian dengan desain library research, tentu dengan menampilkan data pendidikan di regional penelitian yang diambil, yaitu Provinsi Bali. Kajian ini memberikan pembuktina bahwa pemerintah pusat belum mewujudkan anggaran 20,00 persen dari total pendapatan negara dalam APBN, dengan alasan kondisi keuangan yang belum mencukupi.

Indonesia harus ikuti meratifikasi MDGs, karena sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Masalah pendidikan bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dengan berbagai keterbatasan. Solusi terakhir adalah peran aktif dari masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan tersebut. Penutup yang disampaikan dalam kajian ini adalah MDGs akan dapat terwujud jika terjadi peningkatan partisipasi murni anak usia 7-15 tahun, rasio yang semakin merata pada

angka melek huruf usia remaja, meningkatkan proporsi anak di dalam kelas dan menekan anak *drop out* di SD dan SLTP.

Penelitian di atas dapat dinyatakan relatif tidak memberikan solusi atas dasar kajian kebutuhan masyarakat, tetapi sebatas wacana, karena dasarnya solusi yang diberikan adalah aspek yang menjadi masalah tidak tuntasnya pendidikan dasar. Saran operasional dalam meningkatkan pembelajaran anak usia wajar 9 tahun menjadi permasalahan. Dalam penelitian yang akan dilakukan fokus pada pemecahan permasalahan tersebut dengan menemukan solusinya.

Perlu juga ditampilkan riset pada subyek penelitian yang bersesuaian, walaupun hanya memberikan perhatian pada pengelolaan anggaran. Asubki (2011) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Belanja dengan Menggunakan *Comparative Budget Statement* (Cbs) pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat Ditinjau dari Pengalokasian Anggaran". Penelitian ini ditampilkan karena dalam kajiannya di sub pembahasan ternyata tidak hanya melihat perubahan dana yang dianggarkan, tetapi juga kesesuaian antara nilai dana dengan program kerja yang dijalankan dengan permasalahan aktual yang ada di masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, secara khusus untuk melakukan kajian kesesuaian antara dana yang dikelola dengan program kerjanya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian yang diperoleh secara ringkas dirumuskan dalam simpulan :

- a. Pengelolaan anggaran atas dasar alokasi belanja pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat masih didominasi pada belanja aparatur negara. Pada alokasi untuk belanja publik masih

dikurangi juga dengan belanja pegawai, sehingga alokasi dana yang bersifat menyentuh permasalahan dasar pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dinyatakan secara umum belum bersesuaian. Salah satu kebijakan yang dapat diteruskan adalah perhatian yang tinggi pada sekolah kejuruan (SMK).

- b. Berdasarkan analisis CBS, baik pada anggaran ataupun realisasi diberikan rincian :
- Pada tahun 2004/2005 secara total terjadi peningkatan anggaran dan realisasi belanja yang dikelola Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dengan pertumbuhan positif. Kriteria peningkatan secara umum ini tidak diberikan kriteria yang baik secara mutlak, karena dihubungkan dengan kesesuaian strategi, ternyata terjadi penurunan untuk anggaran dan realisasi atas belanja publik, lebih spesifik pada belanja modal yang diperuntukkan bagi publik.
 - Pada tahun 2005/2006 secara umum diberikan kriteria yang baik untuk anggaran dan realisasi, karena terjadi pertumbuhan, tetapi lebih spesifik ternyata belanja untuk alat laboratorium dan buku mengalami penurunan.
 - Pada tahun 2006/2007 terjadi pertumbuhan yang tinggi untuk anggaran dan realisasi, walaupun pertumbuhan belanja tersebut masih didominasi peningkatan yang jauh lebih tinggi pada belanja aparatur negara.
 - Pada tahun 2007/2008 pengelolaan anggaran tergolong sangat baik, karena terjadi pertumbuhan yang besar, baik pada belanja tidak langsung ataupun belanja langsung. Akan tetapi, pertumbuhan anggaran belanja langsung yang tinggi tidak dimanfaatkan dalam realisasi, karena pertumbuhan anggaran sebesar 90,05 persen hanya dimanfaatkan secara nyata sebesar 40,84 persen.
 - Pada tahun 2008/2009 pengelolaan anggaran mengalami penurunan (CBS absolut dan relativen bertanda negatif). Kriteria yang diberikan tidak baik, tetapi jika dilakukan analisis mendalam ternyata anggaran untuk belanja langsung mengalami peningkatan (pertumbuhan), begitu juga untuk realisasinya.

Penelitian di atas spesifik melakukan kajian pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok barfat, terkait dengan visi yang dibangun. Pengelolaan anggaran tersebut masih belum relevan dengan visi yang dibangun, yaitu

pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena dominasi belanja masih pada belanja pegawai dan alokasi yang tidak berorientasi pada pendidikan yang mampu mengadakan lapangan pekerjaan serta keterserapan output di dunia pendidikan. Kebijakan yang relevan hanya berhubungan dengan upaya pendidikan melalui SMK, tetapi belum didukung dengan alokasi anggaran.

Suyuti (2010) melakukan penelitian yang luas atas perencanaan, tetapi fokus pada relevansinya dengan pengelolaan keuangan. Penelitiannya berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mataram; Suatu Studi Dari Perspektif Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi". Tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja keuangan daerah di Kota Mataram.

Penelitian ini ditampilkan karena pengelolaan keuangan dari aspek perencanaan pada setiap SKPD, selanjutnya sebagai dasar dalam menyusun APBD oleh pemerintah dengan persetujuan DPRD Kota Mataram. Dalam penelitian ini ditampilkan rencana kerja setiap SKPD, dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran), termasuk juga oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram. Simpulan yang diperoleh adalah :

- a. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan daerah Kota Mataram ditinjau dari KUA tidak berjalan, karena tidak mengandung kegiatan aktual, target dan nilai pagu. Temuan ini memberikan indikasi bahwa APBD Kota Mataram tidak menunjukkan nilai nominal dari strategi pembangunannya. Ketidaksesuaian tersebut dapat juga dilihat dari kebijakan yang dijalankan oleh masing-masing SKPD tidak merujuk untuk merealisasikan RPJP, RPJM dan renstra Kota Mataram. Dapat juga dinyatakan bias, dalam merealisasikan visi dan misi, sehingga dalam

jangka panjang pembentukan Kota Mataram sebagai pusat perdagangan dan jasa sulit untuk terwujud.

- b. Tahap implementasi dari pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai, dalam arti sistem akuntansi dan pengawasan berjalan. Temuan atas aspek ini memberikan makna bahwa penyelewengan dana APBD tidak terjadi pada tahap ini atau tidak terjadi melalui pengambilan kesempatan dari kelemahan sistem akuntansi dan pengawasan internal.
- c. Hasil evaluasi dari pengelolaan keuangan daerah perlu dengan cermat, karena jika hanya menggunakan data kuantitatif atau rasio yang terbentuk dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi, karena tahap perencanaan dari APBD yang berjalan tidak sesuai dengan RPJP, RPJM dan renstra Kota Mataram serta sisi lain ada komponen penting dari renstra yang perlu dibenahi, terutama terkait dengan nilai PAD.

Simpulan penelitian di atas tidak dirangkum kembali guna memberikan informasi yang sebenarnya dari hasil riset yang dilakukan Suyuti (2010). Fakta perencanaan yang diajukan oleh setiap SKPD tidak berjalan dengan baik, sehingga APBD Kota Mataram tidak sejalan dengan upaya realisasi rencana yang dibangun oleh setiap SKPD.

Penelitian terdahulu di atas mempunyai perhatian yang tinggi atas pelaksanaan otonomi daerah dan ada juga secara spesifik melakukan kajian atas kerja SKPD dalam mewujudkan tujuan akhir berupa pengentasan permasalahan yang urgen dalam masyarakat. Fakta yang ditemukan, tidak seluruhnya berjalan dengan konsep yang diharapkan, sehingga masih jauh dari cita-cita dari praktek otonomi daerah ini, dengan arah penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera dan rendah biaya, tentunya melalui berbagai persyaratan, seperti keputusan yang menyentuh akar permasalahan, birokrasi yang cepat dan tepat, transparansi, akuntabilitas dan berbagai aspek penting lainnya.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam pemerintahan di Indonesia bukan hal yang baru, karena dalam prakteknya otonomi daerah telah dijalankan dalam pemerintahan desa. Adapun dilihat dalam perundangan telah menjadi kajian sejak tahun awal kemerdekaan. Perundangan yang mengelola mengenai sistem pemerintahan otonom (daerah otonom) mempunyai runtutan sebagai berikut (Lubis, 2003):

- a. UU No. 1 Tahun 1945, tentang Komite Nasional Daerah
- b. UU No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah
- c. UU No. 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- d. UU No. 18 Tahun 1965, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- e. Tap MPRS No. XXI Tahun 1966, tentang pemberian otonomi seluas-luasnya Kepada Daerah
- f. UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- g. Tap MPR No. XV Tahun 1998

Desakan otonomi daerah sebagai solusi permasalahan bangsa yang menyangkut multi aspek ini semakin kuat pada era reformasi. Diterbitkan undang-undang otonomi daerah No. 22 tahun 1999, dalam waktu tiga tahun kembali dilakukan revisi dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004. Otonomi daerah telah dijalankan dengan berbagai bentuk perubahan dalam sistem pemerintahan, seluruhnya memerlukan kajian pola kembali agar dapat diperoleh hasil yang paling optimal. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak luas terhadap pengaturan keuangan, pembagian fungsi, tugas dan pelaksanaan pemerintahan lainnya (dimensi ekonomi, pemerintahan dan politik). Lebih jelasnya perlu ditampilkan definisi otonomi daerah. Otonomi daerah dinyatakan sebagai "proses pelimpahan wewenang perencanaan,

pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi kepada unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom dan *parastatal* ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi pemerintah (Cheema dalam Said, 2005:5).

Dalam definisi tersebut terlihat jelas peran dari unit pelaksana yang ada di daerah, berarti merujuk pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dapat berupa dinas dan lembaga yang ada di daerah. Konsep daerah otonom harus merujuk pada pemberian wewenang yang luas, bukan lagi ada konsep yang dibatasi atau pencabutan oleh pihak pemerintah pusat. Konsep ini yang mendasari UU No. 5 Tahun 1974 diperbaiki dengan perundangan yang baru (UU. No. 22 Tahun 1999). Perundangan memberikan jaminan hukum diberlakukannya suatu sistem, jika ada kemungkinan yang lebih baik, maka dapat dilakukan revisi sebagai bentuk tugas dari dewan. Hal ini ditemukan dalam penelitian Suhardi (2003) mengenai komparasi UU No. 5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999. Beberapa simpulan yang diperoleh adalah :

- a. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 masih ada ketentuan yang menyatakan bahwa urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah dapat dicabut kembali dengan ketentuan peraturan yang ada. Hal ini menunjukkan masih adanya kemungkinan tidak dilakukan otonomi daerah yang sebenarnya.
- b. Dalam pembagian keuangan, pada UU No. 5 Tahun 1974 seluruh sumber keuangan proporsi perimbangannya lebih besar untuk pemerintah pusat dibandingkan untuk pemerintah daerah. Adapun untuk UU No. 22 Tahun 1999 perimbangan tersebut pada sumber pendapatan tertentu lebih besar perimbangan untuk daerah dibandingkan untuk pemerintah pusat.

Dalam prakteknya UU No. 22 Tahun 1999 juga masih memerlukan revisi, sehingga diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004. Konsep ini akan terus berlanjut sejalan

dengan kebutuhan untuk perbaikan. Konsep otonomi daerah dapat dinyatakan sebagai konsep pengelolaan pemerintahan yang dikenal diseluruh dunia. Dinyatakan demikian, karena Bank Dunia juga mempunyai konsep mengenai otonomi daerah. Menurut Bank Dunia sesuai dengan kutipan Said (2005:6) mendefinisikan daerah otonom sebagai "pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi pemerintah yang menjadi bawahannya atau yang bersifat semi-independen dan atau kepada sektor swasta".

Setiap pihak memberikan definisi yang berbeda mengenai otonomi daerah, tergantung pada sudut pandang yang diberikan. Suatu pemerintahan juga mengaktualisasikan otonomi daerah menurut pemahaman dan kepentingannya. Pelaksanaannya otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, sedangkan untuk perimbangan keuangan diatur dalam UU No. 33 tahun 2004. Dalam perundangan ini, otonomi daerah lebih pada desentralisasi administratif, sebagai "pelimpahan wewenang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya keuangan sebagai upaya menyediakan pelayanan umum kepada berbagai level pemerintah" (Halim dan Mujib, 2009:25). Delegasi tanggung jawab tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pendanaan dan pengelolaan berbagai pelayanan umum dari pemerintah pusat dan lembaga pelaksanaanya kepada berbagai unit pemerintah di berbagai level.

Delegasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk desentralisasi administratif, yaitu :

- a. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah yang berada dalam garis hierarkinya.
- b. Devolusi, yaitu pelimpahan wewenang kepada pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemda mendapat diskretion yang tidak dikontrol oleh pusat.
- c. Pendelegasian, yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tidak langsung oleh pusat (Halim dan Mujib, 2009:26).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, tidak seluruh aspek pengelolaan ekonomi dan pemerintahan diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dengan alasan kestabilan ekonomi dan terjaminnya negara kesatuan Republik Indonesia. Di antara aspek yang tersebut adalah kebijakan moneter, fiskal dan hubungan dengan luar yang ada hubungannya dengan kegiatan politik. Desentralisasi dengan aplikasi otonomi daerah menjadi pilihan, dengan pertimbangan keuntungan berikut ini :

- a. Lebih mendekatkan pengambil keputusan dengan masyarakat yang menjadi sasarannya sehingga operasionalisasi keputusan lebih realistik, efektif dan efisien.
- b. Meringankan beban organisasi pada level yang lebih tinggi sehingga dapat menggunakan waktu, energi dan perhatiannya ke sasaran permasalahan yang lebih strategik.
- c. Membina kemampuan bertanggungjawab demi penerima wewenang pada tingkat yang lebih rendah, sehingga secara langsung menciptakan kaderisasi yang lebih empirikal dan sistematis.
- d. Dengan kewenangan yang diterimanya, kebanggaan para pengambil keputusan dan pelaksana keputusan pada tingkat yang lebih rendah akan terbangun karena dipercaya oleh pemerintah yang lebih tinggi (Rasyid dalam Salam, 2001:123)

Terdapat ragam penjelasan mengenai otonomi daerah, bahkan banyak peneliti yang menjadikannya tema, dengan berbagai pendekatan kajian. Penelitian yang akan

dilakukan juga dalam konteks implementasi otonomi daerah, di mana peran SKPD akan lebih muncul, setidaknya dalam merumuskan strategi dan pembiayaan.

3. Konsep Strategi dalam Otonomi Daerah

Strategi selalu terkait dengan aspek luas mengenai organisasi atau hal yang lebih luas (pemerintahan) agar selalu terjadi perubahan menuju perbaikan atau peningkatan. Hal ini relevan dengan definisi yang diberikan Rangkuti (2001:4), yaitu :

Tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Perencanaan strategis dimulai dengan pertanyaan “apa yang dapat terjadi” dan bukan pertanyaan “apa yang terjadi”. Berhubungan dengan adanya perubahan, maka organisasi (perusahaan, pemerintah) memerlukan kompetensi inti.

Konsep strategi bukan hanya ada dalam organisasi yang berorientasi profit, tetapi juga pada organisasi publik termasuk pemerintahan secara umum. Strategi terkait dengan suatu dapat direkayasa untuk terjadi, berbeda dengan kondisi yang secara natural akan terjadi. Konteks ini dalam makna apa yang dapat terjadi, bukan apa yang terjadi. Misalnya, kondisi masyarakat yang miskin, maka akan dipastikan terjadi banyak anak usia sekolah akan *drop out* atau sama sekolah tidak masuk sekolah pada usia sekolah. Melalui strategi yang dirumuskan oleh pemerintah, maka kondisi tersebut harus menjadi suatu kondisi anak sekolah.

Strategi dihubungkan dengan skala kajiannya ada yang bersifat jangka panjang dan menyeluruh, dikenal dengan strategi korporat, sedangkan yang sifatnya fungsional dikenal dengan strategi fungsional Rangkuti (2001:5). Pemerintah dapat

merumuskan strategi yang bersifat umum, selanjutnya SKPD dapat lebih mengoperasionalkannya sehingga bersifat lebih faktual di masyarakat. Perumusan strategi tidak lepas dari kemampuan para perumusya dalam melakukan analisis kondisi internal dan eksternal (Robinson dan Pearce, 1997:20). Kondisi internal muncul pada kajian kepemilikan kondisi sumber daya organisasi, dapat berupa keunggulan atau kelemahan, seluruhnya diarahkan untuk mendapatkan setiap peluang dan memperkecil kerugian akibat dari hambatan yang ada.

Dalam setiap organisasi, konteks strategi dilihat dari levelnya akan mengalami perubahan. Pimpinan SKPD mendasarkan diri atas strategi umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga apa yang dicita-cita oleh pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan baik. Adapun SKPD kembali melakukan analisis yang lebih khusus, berhubungan dengan fungsi yang diemban, dirumuskan aspek yang terkait dengan kerja seluruh fungsi yang ada dalam organisasi, selanjutnya setiap fungsi yang ada merumuskan kerja yang dikenal dengan strategi fungsional. Kemampuan memperoleh informasi dan diagnosis kondisi internal dan eksternal organisasi menjadi sangat penting pada kerja setiap pimpinan SKPD. Hal ini yang akan menentukan kerja yang akan dijalankan bersifat pengulangan atau rutinitas, atau sebaliknya akan muncul kreativitas dan inovasi yang tinggi. Hal ini dijadikan dasar kerja bagi seluruh aparatur yang ada, termasuk dalam mengarahkan alokasi penggunaan sumber daya organisasi.

Berhubungan dengan peran strategis SKPD dalam menjalankan kewenangan, termasuk peranan pentingnya sebagai penentu nilai APBD yang dibutuhkan daerah, maka pihak yang berperan dalam penyusunan strategi sangat perlu mengetahui

berbagai konsep strategi dalam era otonomi daerah. Osborne dan Plastrik (1997) memberikan penjelasan dalam perubahan pemerintahan dikenal dengan mengubah mendasar yang dikenal dengan *genetic code* (DNA). Berikut aspek yang diperhatikan, strategi dan pendekatan dalam tabel kerja.

Tabel 2.2. *The Five C's- Strategy Approaches to Change Goverment's DNA*

<i>Level</i>	<i>Strategy</i>	<i>Approaches</i>
<i>Purpose</i>	<i>Core strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Establisihing clarity of purpose</i> • <i>Establisihing clarity of role</i> • <i>Establisihing clarity of direction</i>
<i>Incentives</i>	<i>Consequences strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Managed competition</i> • <i>Enterprise management</i> • <i>Performance managemen</i>
<i>Accountability</i>	<i>Customer strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer choice</i> • <i>Competitive choice</i> • <i>Customer quality assurance</i>
<i>Power</i>	<i>Control strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Organizational empowerment</i> • <i>Employee empowerment</i> • <i>Community empowerment</i>
<i>Culture</i>	<i>Culture strategy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Breaking habits</i> • <i>Touching hearts</i> • <i>Winning minds</i>

Sumber : Osborne dan Plastrik (1997)

Pada tabel tersebut dijelaskan mengenai aspek yang diperhatikan (tuas yang digerakkan, atau *factor leverage*) terdiri atas lima aspek dan sekaligus lima strategi yang dijalankan. Aspek usaha melalui strategi dasar, aspek insentive melalui strategi konsekuensi, aspek akuntabilitas digerakkan melalui strategi konsumen, kekuatan atau kekuasaan digerakkan melalui strategi kontrol dan terakhir aspek budaya digerakkan melalui strategi budaya. Uraian tersebut akan lebih jelas melalui konsep makna lima strategi C tersebut oleh Wasistiono (2003:26) sebagai berikut :

- a. Strategi dasar (*core strategy*) mengacu pada kejelasan mengenai tujuan, peranan dan arah perkembangan organisasi. Strategi harus didasarkan pada hal yang akan dicapai, baik pada jangka panjang atau jangka pendek.
- b. Strategi konskuensi (*consequences strategy*) yang mengacu pada pengelolaan kompetensi, manajemen wirausaha dan manajemen kinerja. Organisasi pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan tertentu harus mengacu pada keunggulan kompetitif dan dilakukan dengan konsep wirausaha serta melakukan upaya peningkatan kinerja. Konsep wirausaha menunjukkan konsep yang bukan maksimalisasi profit, tetapi konsep pemasaran yang merujuk pada kepuasan pihak yang dilayani, bahkan merujuk pada konsep pemasaran sosial, yaitu konsep terpenuhinya kepuasan dan kesejahteraan pelanggan.
- c. Strategi pelanggan (*customer strategy*); strategi yang dirancang bukan atas apa yang ingin dilakukan organisasi, tetapi apa yang harus dilakukan atas dasar penelaahan kebutuhan masyarakat (konsumen).
- d. Strategi pengendalian (*control strategy*); mengacu pada keorganisasian, pemberdayaan organisasi, pemberdayaan aparatur dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Strategi budaya (*culture strategy*). Strategi budaya mempunyai orientasi menghilangkan kebiasaan yang sudah tidak sesuai, mengambil hati pekerja atau pelanggan dan menenangkan pikiran pada arah yang akan dicapai.

Otonomi daerah dengan perancangan lima strategi tersebut oleh setiap SKPD akan dapat menciptakan paradigma baru dalam organisasi publik, jadi harus mutlak mengalami perubahan dibandingkan dengan era sentralisasi. Hasil akhir dari seluruh perubahan ini adalah organisasi publik (SKPD) dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan masyarakat yang lebih sejahtera dan melakukan efisiensi.

4. Peran Strategis SKPD dalam Era Otonomi Daerah

Otonomi daerah atau dikenal dengan desentralisasi pada prinsipnya bukan hanya sebagai konsep yang ada di Indonesia, tetapi menjadi konsep dalam sistem pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk membawa perubahan pada

aspek ekonomi dan politik. Hal ini dapat terwujud melalui konsep penerapan yang tepat, karena jika tidak diterapkan akan berdampak pada kesimpangsiuran, bahkan akan berakhir pada biaya yang mahal dan akan jauh dari penciptaan kemakmuran masyarakat.

Otonomi daerah pada prinsipnya akan memberikan keleluasaan wewenang dan tanggung jawab bagi daerah, termasuk SKPD dalam merancang strategi yang inovatif dalam memecahkan akar permasalahan di wilayah kerjanya. Hal ini akan berdampak pada daya saing yang lebih tinggi antar daerah otonom (Salam, 2001:3). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai wewenang dalam merancang strategi, bukan lagi sebagai organisasi yang bekerja atas strategi pusat, di mana kemungkinan bias yang terjadi sangat tinggi.

Peran strategis SKPD dalam era otonomi daerah dapat juga dilihat pada penyusunan APBD. Setiap SKPD melalui kebijakan umum anggaran (KUA) mengajukan berbagai kebijakan dan program kerja, target kerja dan nilai nominal yang dibutuhkan dalam merealisasikan kebijakan yang dirumuskan. Melalui kerja yang demikian, maka APBD dapat dinyatakan sebagai satuan moneter dari himpunan strategi yang disusun oleh daerah yang berasal dari strategi dan kebijakan serta program kerja yang dicanangkan oleh setiap SKPD. Kemampuan SKPD dalam menunjukkan peranannya dalam memecahkan permasalahan mendasar masyarakat, sesuai dengan bidangnya sangat dibutuhkan (Bastian, 2006:28).

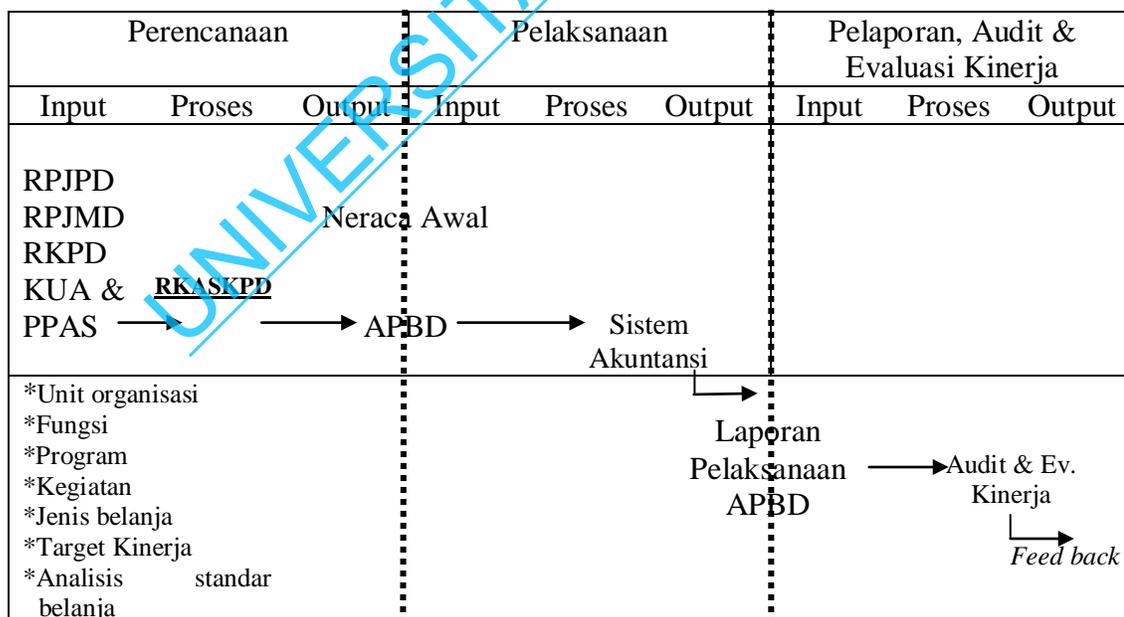
Penelitian ini fokus pada peran dinas (SKPD), seluruh kerjanya akan terlihat dari bagaimana strategi dirancang, kebijakan dan program kerjanya. Hal ini akan tergambar dari inovasinya dalam melakukan usulan program kerja sebagai upaya

untuk mengimplementasikannya. Kemampuan SKPD dalam mengoperasionalkan kebijakan pembangunan daerah, baik jangka pendek dan jangka menengah dalam kerja aktual tahunan sangat diperlukan.

Setiap SKPD harus mempunyai kerja sesuai dengan kurun waktu pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. SKPD mempunyai rencana kerja lima tahunan (jangka menengah) dan jangka pendek (jangka waktu satu tahun). Kemampuan dalam mengusulkan kerja ini akan menjadi arah pembangunan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, tentu melalui fungsi dan tugas SKPD terkait.

Peran SKPD dalam pembangunan dapat dilihat perannya pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Peran strategisnya sebagai berikut.

Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; Peran Strategis SKPD



Sumber : Mahmudi (2007:14)

Keterangan :

- RPJPD = Rencana pembangunan jangka panjang daerah
- RPJMD = Rencana pembangunan jangka menengah daerah
- RKPD = Rencana kerja pemerintah daerah
- SKPD = Satuan kerja perangkat daerah
- RKA = Rencana kerja dan anggaran
- Renja = Rencana kerja
- Renstra = Rencana strategis
- KUA = Kebijakan umum APBD
- PPAS = Prioritas dan plafon anggaran sementara

SKPD (Dinas dan lembaga yang ada di daerah otonom) mempunyai peran penting dalam memaknai RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, tentunya dengan konsep koordinasi diantaranya. Dalam penelitian ini, bagaimana strategi dan program kerja yang dijalankan sejalan atau tidak dengan rencana pembangunan daerah atau akar permasalahan yang ada di masyarakat menjadi perhatian utama.

5. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Alasan pemilihan desentralisasi dalam era reformasi telah dijelaskan sebelumnya. Nasrin dan Leonardo (2010:11) mengutip pendapat Cheema dan Rondeneli (1988) memberikan pertimbangan alasan yang lebih luas, yaitu :

1. Perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, karena kondisi daerah yang heterogen.
2. Menciptakan birokrasi yang lebih sederhana.
3. Meningkatkan sensitivitas pejabat daerah atas permasalahan masyarakatnya.
4. Penetrasi dari pusat ke daerah, secara spesifik lebih baik.
5. Alokasi sumberdaya dan investasi pemerintah pusat pada daerah lebih baik.
6. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan swasta di daerah.
7. Efisiensi pemerintahan di tingkat pusat.

8. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
9. Melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
10. Meningkatkan pengawasan pada elit lokal
11. Administrasi daerah yang lebih inovatif dan kreatif.
12. Kemudahan dalam memberikan pelayanan
13. Memantapkan stabilitas politik
14. Menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah di daerah

Berbagai alasan tersebut tidak lepas dari permasalahan ekonomi, seperti alasan kemudahan investasi, alokasi sumber daya, implementasi program, terlebih harga lebih rendah. Akhir dari seluruhnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. SKPD mempunyai kerja untuk lebih mempercepat dan meningkatkan intensitas kesejahteraan tersebut, tentu melalui fungsi dan tugas yang bersesuaian.

Dinas Dikpora mewujudkan alasan tersebut melalui pembangunan sumber daya manusia, terkait dengan implementasi sektor pendidikan. Pembangunan merupakan "proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Disamping itu untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan" Todaro (2000) dalam Safi'i (2008:38). Dalam definisi ini jelas sangat terkait dengan upaya yang akan ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia yang menjadi peran SKPD dalam pemerintah daerah otonom. Ditegaskan demikian, karena menyangkut perubahan organisasi, meliputi personal dan non personal dalam organisasi pemerintah tersebut.

Sesuai dengan alasan penting kajian dalam penelitian ini, yaitu pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan

sumber daya manusia yang menjadi tugas penting SKPD (Dinas Dikpora) mempunyai makna yang sejalan dengan definisi pembangunan. Kartasamita (1996) dalam Safi'i (2008:38) mendefinisikan pembangunan sebagai "usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan". Pembangunan dalam makna ini sangat identik dengan pengentasan kemiskinan dan bentuk-bentuk lain dari ketertinggalan (pendidikan, sosial dan budaya serta aspek lainnya).

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan manusia, karena muncul sebagai subyek (pelaku) dan obyek (sasaran), sehingga setiap pembangunan pada dasarnya akan menghasilkan peningkatan kualitas SDM, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam memaknai pembangunan terdapat tiga teori besar, sebagai berikut (Nasirin dan Leonardo, 2010:11) :

- a. Teori modernisasi; pembangunan dihubungkan dengan modernisasi. Pembangunan mengarah pada upaya perubahan sosial, dari tradisional menuju modernisasi.
- b. Teori struktural (dependensi); teori ini menegaskan bahwa pembangunan bukan sebagai proses perubahan sosial yang berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan di antara komponen yang ada di dalam maupun di luar.
- c. Teori pertumbuhan ekonomi; dalam teori ini faktor manusia (bukan struktur dan sistem) yang menjadi fokus utama.

Konsep teori tersebut mempunyai pandangan tertentu, tetapi dalam penelitian ini lebih merujuk pada pembentukan perubahan sumber daya manusia untuk lebih berkualitas secara umum (aspek yang luas). Adapun sistem dan struktural dapat dinyatakan sebagai proses yang menjalankannya, karena dalam konsep pemerintahan struktur dan sistem tidak dapat dipisahkan, bahkan dalam implementasinya nuansa politik tidak dapat dipisahkan. Ditegaskan oleh Bastian (2005) bahwa APBD

”Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah” sebagai kebijakan yang bermuatan politik.

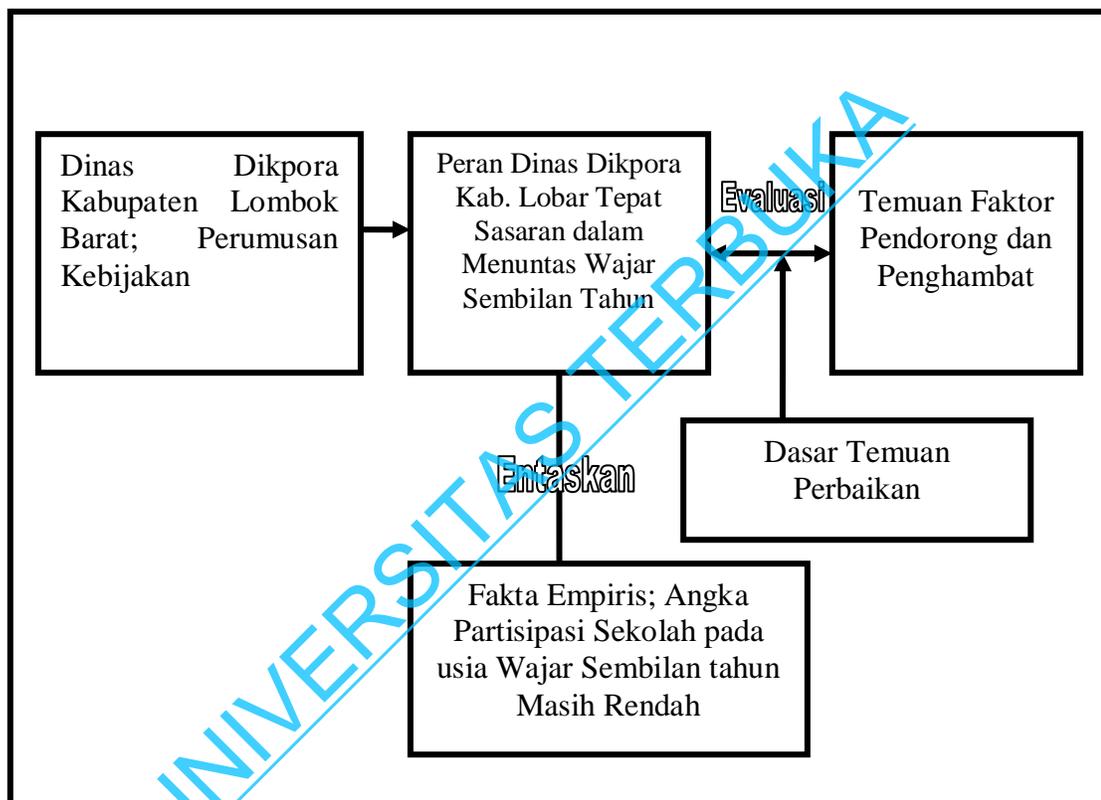
Pembangunan dalam konteks nasional tidak lepas dari pembangunan manusia, sehingga dalam kerangka pembangunan regional dan nasional dikenal capaian pembangunan manusia yang dikenal dengan indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI). Dalam kerangka pembangunan nasional dibandingkan dengan negara lain, HDI Indonesia masih sangat rendah. Dapat dibayangkan rendahnya HDI atau IPM Kabupaten Lombok Barat dalam konteks global. Penelitian ini diarahkan untuk lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan dari dinas terkait dalam melakukan perumusan kebijakan dan program yang menyentuh akar permasalahan, sehingga terjadi peningkatan kemampuan dalam menciptakan kegiatan ekonomi produktif.

B. Kerangka Berpikir

Peningkatan kesejahteraan masyarakat mutlak pada setiap perubahan yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk pada implementasi otonomi daerah. Pemerintah daerah melalui SKPD dapat merumuskan strategi, kebijakan dan program yang menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pola berpikir yang digunakan didasarkan pada banyak ahli, Bastian (2006) dalam peran SKPD mengacukan program kerja, selanjutnya berhubungan dengan dana yang dikelola. Kajian strategi SKPD menggunakan konsep berpikir Osborne dan Plastrik (1997) yang diperkuat dengan kajian dan Robbins dan Pearce (1997). Kajian ini tidak dapat

menggunakan satu konsep berpikir ahli, karena penelitian ini kajian deskripsi temuan, selanjutnya temuan atas faktor penghambat dan pendorong sebagai dasar untuk merumuskan strategi lanjutan. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian



Berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Barat sebagai media vital dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selanjutnya menggerakkan kemampuan dalam menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat perlu didasarkan atas kebijakan dan program kerja yang tepat dari Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Tercapainya hal ini, jika permasalahan pendidikan dasar

telah dapat dituntaskan, karena akan menjadi input untuk proses pendidikan yang lebih tinggi. Fakta empiris yang ada, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempunyai permasalahan pada pendidikan dasar, terlihat dari adanya anak putus sekolah atau drop out atau belum masuk pada sekolah dasar. Angka partisipasi sekolah pada usia belajar sembilan tahun (SD dan SMP) perlu ditingkatkan, sehingga penelitian ini lebih mengacu pada pemecahan masalah dasar.

C. Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini perlu diidentifikasi dan diberikan definisi operasional, sebagai berikut :

1. Peran strategis merupakan berjalannya fungsi perubahan dengan efektif melalui inovasi yang dijalankan oleh organisasi. Dalam penelitian ini berhubungan dengan fungsi yang dijalankan SKPD Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam era otonomi daerah dalam pembangunan sumber daya manusia, secara spesifik untuk wajar sembilan tahun.
2. Pembangunan sumber daya manusia merupakan peningkatan atau perbaikan kualitas masyarakat dihubungkan dengan perolehan pendidikan dan sistem yang dijalankan agar dapat hidup secara layak dari aspek ekonomi, sosial dan aspek lainnya dalam kehidupan. Konteks ini setidaknya dalam persiapan, sebagai input dari pendidikan yang lebih tinggi, sehingga untuk tahap awal hanya terkait dengan kemampuan menjalankan kebutuhan dasar "dapat membaca dan menulis" sehingga dapat mendukung kegiatan lanjutan dalam pembangunan SDM.

3. Kebijakan merupakan langkah-langkah kerja operasional yang dijalankan oleh SKPD Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam mengimplementasikan strategi yang dirumuskan berhubungan dengan sektor pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Banyak aspek yang termasuk dalam kebijakan ini, termasuk pemilihan alternatif program kerja dan alokasi dana yang berpihak pada penuntasan wajar sembilan tahun.
4. Wajib belajar sembilan tahun merupakan aktualisasi proses pendidikan yang wajib ditumpuh oleh anak usia sekolah mulai dari umur enam tahun dalam mendapatkan pendidikan dasar berupa sekolah dasar selama enam tahun dan pendidikan sekolah menengah pertama selama tiga tahun, sehingga total waktu pendidikan dasar selama sembilan tahun.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih pada penelitian natural atau menampilkan apa adanya dari temuan, tanpa menggunakan analisis statistik atau sejenisnya (Maleong, 2002). Penelitian ini akan menampilkan berbagai kebijakan yang diambil pada periode kajian, selanjutnya dianalisis kesesuaiannya dengan fakta yang ada, baik fakta implementasi ataupun fakta permasalahan.

Seluruh temuan tersebut diuraikan secara sistematis, sehingga desain penelitiannya termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan uraian atas variabel mandiri, tanpa melakukan pembuatan model atau analisis asosiatif (Sugiyono, 2004:11). Penelitian ini dirancang dengan menguraikan variabel secara mandiri, dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan fakta dan data yang valid.

B. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Adapun sebagai informannya adalah Kepala Dinas, pejabat yang mempunyai hubungan kerja dengan pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP), dikenal dengan pendidikan dasar dalam SKPD terkait serta pejabat lain yang mempunyai pengalaman kerja berhubungan dengan dikdas tersebut. Dalam rangka lengkapnya

kajian ini, obyek penelitian juga diambil dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, khususnya yang membidangi pendidikan.

C. Ruang Lingkup

Instrumen dalam penelitian ini dirancang sebagai berikut :

Aspek Penelitian	Temuan
Peran strategis	Visi
	Kebijakan
	Program
	Pengelolaan anggaran
	Faktor Pendukung dan Penghambat
Pengembangan SDM	Penciptaan kualitas SDM ”melalui wajar sembiat tahun dalam konteks kebutuhan dasar pendidikan dan menjadi input proses pendidikan lanjutan”

Personal yang dijadikan sebagai sumber informasi atau informan atas berbagai variabel dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Dikpora Lobar dan pejabat dibawahnya yang berhubungan dengan pengelolaan program serta jabatan yang berhubungan dengan pendidikan dasar. Personal tersebut adalah personal inti dari pengumpulan data yang dilakukan, tetapi dapat saja pejabat lain pernah menjabat sesuai dengan pekerjaan pengelolaan pendidikan dasar, sehingga dapat saja informannya adalah jabatan pada bagian lain yang ada di SKPD terkait. Informan dalam penelitian ini perlu diperluas, yaitu anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, khususnya komisi yang membawahi atau mengurus pendidikan (Komisi 4).

D. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab (satu arah) baik secara langsung atau menggunakan alat bantu komunikasi (telepon atau sejenisnya). Data yang dikumpulkan berupa strategi, kebijakan, program dan kegiatan aktual yang dijalankan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, termasuk juga data mengenai faktor penghambat dan pendorongnya.
2. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan atau sejenisnya atas dokumen yang dimiliki pihak lain. Dalam penelitian bersumber dari data BPS dan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

Prosedur pengumpulan data yang dijalankan dalam penelitian ini adalah :

1. Temuan kondisi empiris pembangunan sumber daya manusia; tingkat pendidikan, jumlah putus sekolah pada berbagai umur dan tingkat pendidikan, jumlah bangunan sekolah, murid dan guru serta spesifikasi pendidikan yang dijalankan. Temuan ini diarahkan untuk memberikan informasi yang spesifik pada kondisi aktual proses pendidikan sembilan tahun, berarti pada dua jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
2. Kebijakan dan program kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, diperoleh dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rencana strategis yang diterbitkan untuk jangka waktu lima tahunan. Seara spesifik yang diarahkan untuk mengentaskan permasalahan wajib belajar sembilan tahun.

3. Analisis pengelolaan keuangan untuk mendukung kebijakan dan program kerja tersebut. Seluruhnya bersumber dari anggaran dan belanja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Secara spesifik yang diarahkan untuk pendidikan SD dan SMP.
4. Penelaahan faktor pendukung dan penghambat dengan mengacu pada kondisi internal dan eksternal organisasi. Informasinya bersumber dari renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, secara spesifik yang memberikan gambaran kondisi pendidikan tingkat SD dan SMP.

Berbagai data tersebut dapat berupa data kuantitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data berupa keterangan-keterangan, sedangkan data kuantitatif berupa data dalam satuan moneter, satuan unit dan lainnya.

E. Metode Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat

Implementasi kebijakan merujuk pada capaian hasil kerja, terjadi bias atau tidak antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai. Implementasi lebih merujuk pada uraian fakta empiris hasil kerja yang telah dicanangkan.

Konteks ini murni sebagai temuan, sehingga akan dapat diuraikan sedemikian rupa pada bab selanjutnya. Implementasi kebijakan tidak dimaknai sebagai proses muncul implementasi kebijakan, tetapi lebih pada temuan fakta penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang dihasilkan oleh kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

2. Kebijakan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat

Langkah kerja yang diambil oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat untuk mengatasi permasalahan pembangunan SDM dapat dilihat dari KUA dan Renstranya. Pada tahap ini, sifatnya hanya melakukan identifikasi atau temuan atas kebijakan atau program kerja yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Secara spesifik yang diarahkan untuk mengentaskan permasalahan yang ada pada program wajib belajar sembilan tahun.

Langkah tersebut diikuti juga dengan memberikan uraian atas fakta kondisi pendidikan yang dijalankan untuk taraf SD dan SMP di Kabupaten Lombok Barat. Kajian kesesuaian antara kebijakan dan fakta ditelaah pada bagian ini. Seluruhnya mengandalkan kedalaman analisis secara kualitatif, dengan mengedapankan fakta atau data, bukan isu. Penting sebagai aspek yang akan diuraikan pada tahap ini adalah alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang dikelola Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

3. Temuan Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dan penghambat dalam perumusan kebijakan dan implementasinya dikaji atas dasar fakta empiris pengelolaan pada periode sebelumnya, hasil kajian faktor internal dan eksternal (pada Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat) serta informasi dari otoritas organisasi. Faktor pendorong dan penghambat digolongkan intensitasnya, di mana hanya atas lima faktor yang disusun sesuai dengan intensitasnya.

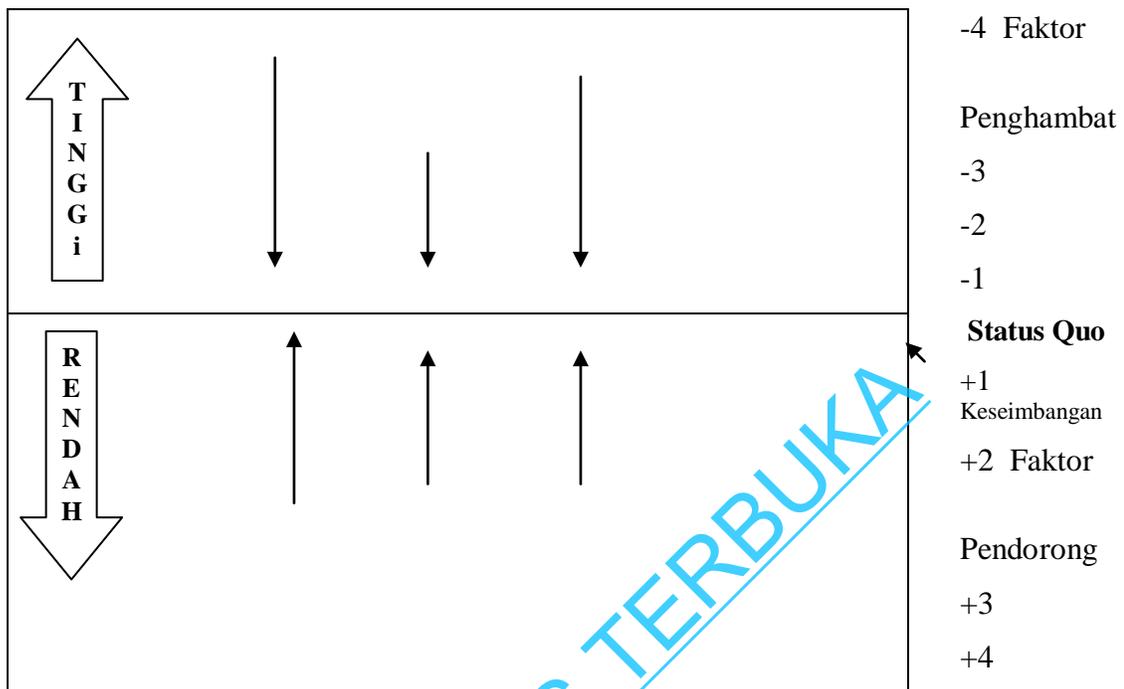
Kerja tersebut didasarkan atas kerja FFA (*force field analysis*). Analisis FFA adalah “teknik yang dikembangkan untuk mendiagnosis situasi-situasi yang mungkin

bermanfaat untuk memperhatikan variabel-variabel yang berkaitan dengan determinasi efektif” (Nisjar dan Winardi, 1997:33). Cara kerjanya adalah :

- a. Mengidentifikasi masalah yang berpengaruh pada keadaan yang terkait dengan ketidakpuasan yang menyebabkan terjadinya kehendak untuk mengadakan perubahan dari keadaan sekarang (*issue kritis*). Dalam penelitian ini berupa wajar sembilan tahun yang belum berhasil, diidentifikasi dengan angka partisipasi sekolah tingkat SD dan SMP yang masih rendah.
- b. Melakukan analisis berupa perincian atas faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan tugas Dinas Dikpora Kabuapten Lombok Barat, terutama dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Faktor penghambat dan pendorong yang ditemukan hanya mempertimbangkan yang mempunyai intensitas tertinggi (dalam penelitian ini pada empat tingkatan). Faktor pendorong dan penghambat dirancang dalam tabel FFA.
- c. Merencanakan perubahan yang dikehendaki, dalam arti memperkuat faktor pendorong atau melemahkan faktor penghambat, sehingga dapat dicapai kondisi yang diharapkan.

Temuan pada b digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1. Kekuatan yang Mendorong dan Menghambat yang Berada Dalam Keadaan Keseimbangan.



Sumber: Nisjar dan Winardi (1997:34)

Faktor keseimbangan yang ada saat ini dikenal dengan *status quo*, suatu kondisi yang tidak diinginkan. Untuk itu, segera dilakukan pembenahan. Analisis FFA pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan ketiga. Dalam hal ini akan dipilih alternatif meningkatkan faktor pendorong atau memperlemah faktor Hambatan. Seluruh tahapan ini dirancang secara sistematis, termasuk dalam menguraikan temuannya.

Status quo dalam riset ini memberikan gambaran kondisi saat ini, di mana indikasi bahwa wajar sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat masih memerlukan perhatian oleh SKPD untuk difokuskan dalam pelaksanaan kerjanya, dengan cara perumusan strategi yang lebih tepat, perumusan kebijakan yang tepat serta implementasi lanjutan yang dapat menyentuh akar permasalahan.

BAB IV

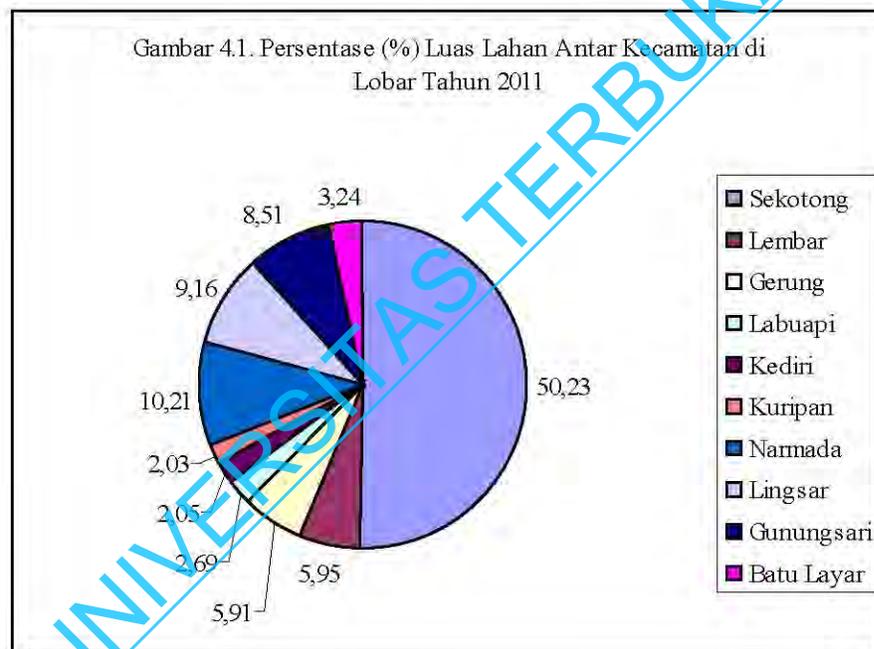
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kondisi Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat

Pendidikan menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya, karena akan memberikan kontribusi pada kemampuan melakukan analisis, inovatif dan pengambilan keputusan atas dasar logika. Aspek ekonomi regional suatu daerah tidak mengalami perkembangan, karena ketidakmampuan masyarakatnya dalam penciptaan kegiatan ekonomi produktif. Aspek tersebut membutuhkan dukungan pengetahuan, begitu juga dengan banyaknya kegiatan anarkis pada setiap daerah pada prinsipnya berawal dari pendidikan yang relatif rendah.

Sebelum diberikan uraian atas aspek pendidikan perlu diketahui kondisi Kabupaten Lombok Barat secara geografis, karena aspek ini juga berhubungan dengan peluang dan hambatan dalam pembangunan aspek pendidikan. Kabupaten Lombok Barat setelah mengalami pemekaran (pemecahan menjadi kabupaten Lombok Utara) mempunyai luas 862,62 km². Terdiri atas sepuluh (10) kecamatan, dengan perincian luas yang sangat beragam. Kecamatan Sekotong mempunyai luas daerah sebesar 50,23 persen (529,38 km²) dari luas kabupaten yang ada. Hal ini jelas menimbulkan permasalahan dalam pembangunan, terutama sektor pendidikan di Kecamatan Sekotong (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2011). Terlebih kondisi lahan di Kecamatan Sekotong lebih cenderung daerah kritis, hanya sebanyak 3.040 ha atau 30,40 km² dapat dijadikan sebagai lahan pertanian.

Kecamatan lain yang cukup luas adalah Kecamatan Narmada dengan luas 107,62 km² atau sebesar 10,21 persen dari luas total, sementara kecamatan lainnya berada pada kisaran luas 2-5 persen. Luas wilayah yang tidak merata ini dapat menjadi masalah awal dalam pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat diindikasikan dari awal bahwa dua kecamatan tersebut mempunyai kondisi pendidikan masyarakat yang terendah (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2011). Informasi lebih lengkapnya pada gambar berikut.

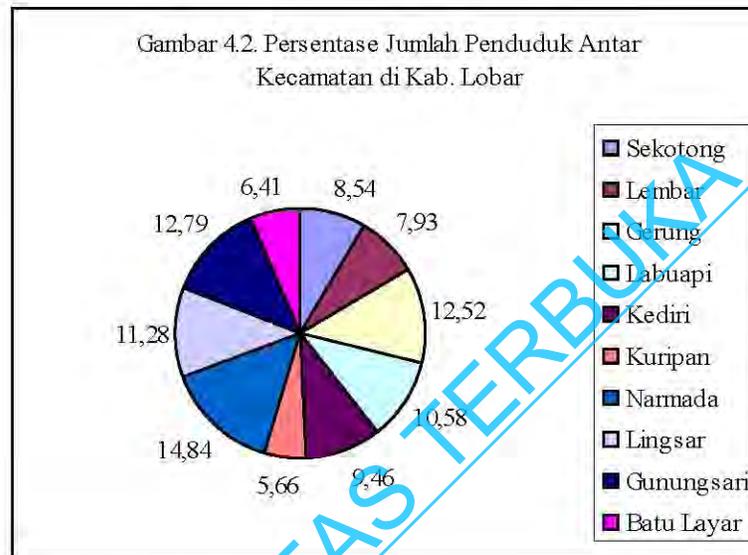


Sumber : BPS Lobar diolah, Tahun 2011.

Pada kondisi luas wilayah tersebut, jelas tidak terjadi keseimbangan, sehingga perlu diterapkan pengelolaan pembangunan dan keuangan yang sifatnya khusus untuk daerah yang mempunyai luas wilayah yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Dapat saja terjadi adanya masyarakat yang berdomisili di pelosok, sehingga

kondisi pendidikan yang ada sangat minim dan membutuhkan perjuangan tinggi untuk mendapatkan pendidikan dasar, terlebih pendidikan tinggi.

Dalam rangka mendukung informasi tersebut, berikut diberikan informasi jumlah penduduk dalam persentase di setiap kecamatan.



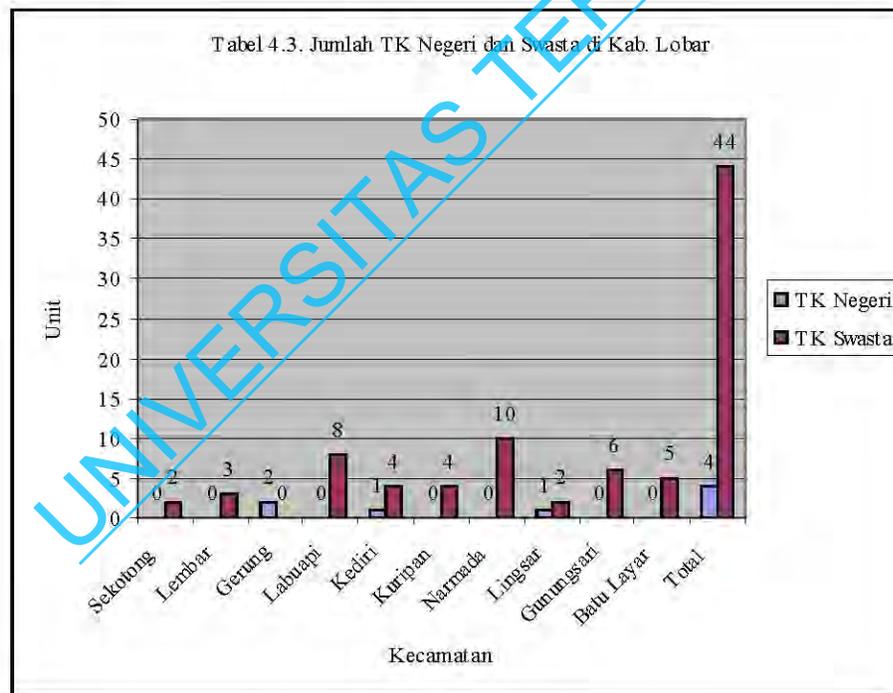
Sumber : BPS Lobar diolah, Tahun 2011.

Sebaran penduduk di Kabupaten Lombok Barat tidak proposional dengan luas wilayah pada setiap kecamatan. Persentase penduduk tertinggi berada di Kecamatan Narmada, bukan di Kecamatan Sekotong. Kecamatan Gerung dengan luas 5,91 persen, ternyata memiliki jumlah penduduk sebesar 12,52 persen. Implikasinya adalah ada kecamatan yang tergolong mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, sementara ada kecamatan lain relatif rendah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga perlu menerapkan manajemen tertentu dalam mengatasi masalah pendidikan di setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya berikut diberikan gambaran

kondisi pendidikan warga dan fasilitas pendidikan yang ada di kabupaten Lombok Barat per kecamatan dalam rangka memberikan informasi yang lebih spesifik.

Pembelajaran dimulai sejak dini, mulai dari Taman Kanak-kanak (bukan termasuk bagian sekolah dasar atau wajib belajar sembilan tahun) dijalankan oleh pihak pemerintah dan swasta di Kabupaten Lombok Barat. Keberadaan TK di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010 ternyata mengalami penurunan, sebelumnya sebanyak 3 unit yang dijalankan pemerintah dan 69 unit dijalankan swasta menjadi 4 unit TK negeri dan 44 unit. Informasi keberadaan TK pada tahun 2010 pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Lobar Diolah, Tahun 2010.

Keberadaan swasta dalam pembangunan di sektor pendidikan sangat diperlukan, sehingga dapat menampung jumlah rombongan belajar yang lebih

banyak. Pembelajaran dimulai sejak dini, sehingga akan memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan pembelajaran di tahap dasar awal, yaitu Sekolah Dasar (SD). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat dianggap mempunyai peran yang rendah dalam pengadaan pendidikan TK, hanya empat (4) unit, yang berada di Kecamatan Gerung, Kediri dan Lingsar.

Pembelajaran yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang dikategorikan wajib belajar, yaitu sembilan tahun. Pendidikan tersebut berada pada tingkat SD selama enam tahun dan tingkat SMP selama tiga tahun. Artinya pendidikan dasar yang wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia minimal berpendidikan tamat SMP.

Pada tahun 2011 jumlah SD, guru dan murid di Kabupaten Lombok Barat diinformasikan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Jumlah SD, Guru dan Murid di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010

No.	Kecamatan	SDN	SD Swasta	Guru	Murid	Perbandingan
1	Sekotong	37	0	347	8.165	23,53
2	Lembar	29	0	270	5.694	21,09
3	Gerung	44	0	432	8.158	18,88
4	Labuapi	30	0	368	6.465	17,57
5	Kediri	26	0	305	6.021	19,74
6	Kuripan	20	0	224	4.275	19,08
7	Narmada	48	0	676	10.023	14,83
8	Lingsar	32	0	373	6.534	17,52
9	Gunungsari	33	2	434	8.609	19,84
10	Batu Layar	21	2	343	5.224	15,23
	Total	320	4	3.772	69.168	18,34

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2010.

Total jumlah SD di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 324 unit, terdiri atas 320 unit SD Negeri dan 4 unit SD swasta. Peran pemerintah yang dominan dalam

pengadaan pembelajaran pada tingkat sekolah dasar, dengan total jumlah guru sebanyak 3.772 orang dan murid sebanyak 69.168 orang. Keberadaan jumlah guru di tingkat SD tergolong sangat memadai, yaitu dengan perbandingan 18 orang per orang guru. Perbandingan jumlah murid dan guru yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Sekotong, yaitu setiap guru menangani murid sebanyak 23 orang, sedangkan yang terendah terjadi di Narmada dan Batu Layar dengan perbandingan seorang guru menangani 15 orang murid.

Kondisi ini perlu mendapatkan pengkajian secara mendalam, yaitu mengenai jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah pada usia anak sekolah dasar, yaitu kisaran umur 7 tahun sampai 12 tahun (BPS Kabupaten Lobar, 2011). Seyogyanya, pihak BPS Kabupaten Lombok Barat membuat distribusi umur penduduk Kabupaten Lombok Barat atas dasar interval umur tersebut, bukan menggunakan interval umur dengan lebar kelas lima tahun. Hal ini menyebabkan *cross check* data tidak dapat dilakukan dengan tepat, karena pihak BPS Kabupaten Lombok Barat membuat interval umur 0 – 4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun dan seterusnya dengan interval tertinggi lebih besar dari 65 tahun.

Informasi anak sekolah di tingkat dasar bukan saja pada SD, tetapi juga pada madrasah ibtidaiyah, SLD dan paket A. seluruh lembaga pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah dasar. Informasi lengkap jumlah murid di sekolah dasar, dalam berbagai lembaga pendidikan diinformasikan sebagai berikut.

Tabel 4.2. Jumlah Murid SD-Sederajat di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010
(dalam satuan orang)

No.	Kecamatan	SD	SLB	MI	Salafiah	Paket A	Jumlah
1	Sekotong	8.165	0	798	0	20	8.983
2	Lembar	5.694	0	537	30	0	6.261
3	Gerung	8.158	0	524	0	0	8.682
4	Labuapi	6.465	0	827	0	0	7.292
5	Kediri	6.021	0	714	38	0	6.773
6	Kuripan	4.275	0	162	0	0	4.437
7	Narmada	10.023	0	1.032	0	0	11.055
8	Lingsar	6.534	26	790	0	0	7.350
9	Gunungsari	8.609	0	971	15	40	9.635
10	Batu Layar	5.224	0	474	22	20	5.740
	Total	69.168	18	6.829	105	80	76.208

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2010.

Informasi tersebut memberikan pembuktian bahwa jumlah siswa pada tingkat sekolah dasar sederajat bukan hanya pada pendidikan negeri, tetapi juga dilakukan oleh swasta, bahkan ada melalui program paket A. Jumlah anak di Kabupaten Lombok Barat yang berada pada umur sekolah dasar (kelas 1-6), dapat dianalisis melalui informasi angka partisipasi sekolahnya rata-rata sebesar 88,39 persen. Angka tersebut memberikan informasi masih terdapat sebanyak kurang lebih dua belas (12) orang anak yang berada pada umur sekolah dasar tidak berada di bangku sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan sekolah dasar atau sederajat. Hal ini memberikan indikasi setiap 100 orang anak terdapat sebanyak 12 orang anak usia sekolah tersebut mengalami *drop out* atau sama sekali belum mendapatkan pendidikan (belum masuk SD).

Data empiris tersebut merupakan suatu permasalahan serius yang perlu mendapatkan pemecahan, karena dipastikan anak yang tidak masuk pada sekolah

dasar atau mengalami *drop out* dapat saja mengalami buta huruf. Kondisi ini akan berakibat pada permasalahan yang kompleks.

Tingkat pendidikan wajib belajar yang dicanangkan pemerintah memberikan persyaratan jelas, bahwa pendidikan minimal masyarakat adalah tamat SMP atau lama sekolah sembilan tahun. Informasi jumlah masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang sedang mendapatkan pendidikan SMP dan tingkat partisipasi sekolahnya sebagai berikut.

Tabel 4.3. Jumlah Siswa SMP-Sederajat dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010.

No.	Kecamatan	SMP	MTs	Lainnya	Jumlah	Angka Partisipas
1	Sekotong	983	477	267	1.727	55,58
2	Lembar	970	486	271	1.727	55,49
3	Gerung	2.034	1.543	408	3.985	81,18
4	Labuapi	1.405	763	210	2.378	58,21
5	Kediri	845	2.870	312	4.027	82,61
6	Kuripan	994	637	143	1.744	81,45
7	Narmada	1.950	1.297	394	3.641	61,88
8	Lingsar	1.940	223	677	2.840	68,43
9	Gunungsari	1.237	2.402	536	4.175	79,52
10	Batu Layar	536	576	565	1.677	72,69
	Total	12.894	11.274	3.783	27.951	70,13

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2010

Keterangan : Lainnya adalah SMP Terbuka, SLB, Salafiah dan Paket B.

Pada Tabel 4.2. dapat diperoleh informasi bahwa pembelajaran untuk tingkat SMP, kontribusi yang diberikan sektor yang berorientasi keagamaan tergolong cukup besar terhadap total pembelajaran masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Kontribusi jumlah murid yang ditampung pada MTs sebanyak 40,33 persen, bahkan pembelajaran SMP terbuka dan lainnya juga tergolong cukup besar, yaitu 13,53

persen. Adapun kontribusi yang diberikan melalui pembelajaran SMP sebanyak 46,13 persen.

Data empiris tersebut berimplikasi pada kebijakan yang harus ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat serta koordinasi dengan dinas lainnya. Koordinasi dengan dinas lain diperlukan, karena ada pembagian tugas pada setiap dinas, misalnya Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat mengurus pendidikan yang berorientasi agama, seperti dilakukan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsaniawiyah (MTs).

Pada Tabel 4.3 juga diinformasikan mengenai tingkat partisipasi sekolah masyarakat pada usia SMP. Rata-rata tingkat partisipasi sekolah usia SMP di Kabupaten Lombok Barat sebesar 70,13 persen. Data tersebut mempunyai makna bahwa setiap 100 orang anak usia sekolah SMP yang tidak berada dalam rombongan belajar sebanyak 30 orang. Kondisi ini jelas merupakan permasalahan yang sangat besar untuk segera dicarikan solusi, tentu melalui perumusan kebijakan dan program kerja yang tepat sasaran.

Kerja yang tepat sasaran yang dimaksud adalah memberikan kesempatan atau menimbulkan motivasi masyarakat untuk melanjutkan sekolah pada tingkat SMP serta mencegah terjadinya *drop out*. Perlu ditemukan akar permasalahan yang ada, sehingga dapat memecahkan masalah secara terus menerus, bukan secara insidental.

Uraian tersebut untuk memberikan penjelasan atas kondisi pendidikan wajib belajar, masih dalam makna kebersertaan masyarakat untuk menuntaskan wajar sembilan tahun. Pencapaian seratur persen wajar di kabupatenm Lombok Barat masih perlu diupayakan dengan intensitas yang tinggi. Hal ini didasarkan atas tingginya

jumlah siswa SD dan SMP sederajat mengalami putus sekolah. Informasinya pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat SD dan SMP Sederajat di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010.

No.	Kecamatan	SD-Sederajat (orang)			SMP-Sederajat (orang)		
		Laki-laki	Wanita	Total	Laki-laki	Wanita	Total
1	Sekotong	59	67	126	23	10	33
2	Lembar	34	25	59	2	2	4
3	Gerung	21	18	39	9	6	15
4	Labuapi	7	3	10	12	6	18
5	Kediri	2	3	5	0	0	0
6	Kuripan	5	1	6	7	7	14
7	Narmada	17	7	24	3	3	6
8	Lingsar	24	23	47	44	44	88
9	Gunungsari	46	32	78	12	12	24
10	Batu Layar	23	10	33	11	11	22
	Total	238	189	427	123	101	224

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2010.

Pada tingkat SD sederajat jumlah siswa yang mengalami putus sekolah (*drop out*) sebanyak 427 orang, dengan jumlah yang relatif berimbang antara yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 238 orang dan wanita sebanyak 189 orang. Hal ini memberikan indikasi bukan pada permasalahan gender, tetapi ada masalah lain yang menyebabkan terjadinya putus sekolah di tingkat sekolah dasar.

Pada tingkat SMP sederajat, total anak yang mengalami putus sekolah sebanyak 224 orang, dengan perincian sebanyak 123 orang laki-laki dan 101 orang wanita. Kondisi ini juga jelas bukan masalah gender, karena jumlah laki-laki yang mengalami putus sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah wanita. Kesadaran untuk perubahan nasib penerus melalui sektor pendidikan merupakan aspek utama penyebabnya. Masyarakat yang ada belum menyadari makna penting pendidikan dalam berbagai kehidupan di masa depan.

Apabila diperhatikan per kecamatan, pada tingkat SD dominan terjadi di Kecamatan Sekotong, sebanyak 29,51 persen dari total kasus di Kabupaten Lombok Barat. Riset atas faktor penyebabnya menjadi sangat penting, untuk itu dilakukan wawancara dengan personal Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat yang membidangi sekolah dasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Januari 2012, terkait dengan faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lombok Barat, berikut hasil wawancaranya :

Kita semua tidak dapat memungkiri data yang ada, jumlah anak putus sekolah tingkat SD dan SMP tergolong tinggi. Permasalahannya disebabkan oleh jarak tempuh anak dalam pembelajaran, alasan ekonomi yang menyebabkan anak ikut terlibat dalam pekerjaan orang tua, tetapi yang utama adalah rendahnya pendidikan orang tua atau kalau bisa menggunakan kata “kebodohan” (mohon maaf, jika terpaksa menggunakan kata itu) yang sifat menjadi warisan dari orang tuanya.....

Artinya, ketidakmampuan orang tua dalam melihat arti penting pendidikan yang menyebabkan anaknya diberhentikan sekolah...jika alasan ekonomi, sekolah dapat dinyatakan tidak berbiaya atau dia sendiri akan mengupayakan bagaimana anaknya untuk terus bersekolah. Tenaga anak kecil dalam membantu pekerjaan dapat dinyatakan relatif kecil...jadi kesadaran untuk memperjuangkan kondisi penerus yang lebih baik tidak ada.

Orang tua yang tidak sekolah akan rendah penalarannya atas segala aspek, ini memerlukan kerja keras dari semua pihak, pihak sekolah juga harus benar-benar dalam menerapkan dana operasional sekolah, bahkan secara khusus memberikan bantuan pada anak yang diindikasikan akan putus sekolah....Guru jangan hanya bekerja di sekolah, upayakan semua pihak, bahkan kepala sekolah mendatangi orang tua anak didik yang ada indikasi akan putus sekolahpemecahan masalah ini sifatnya *in action*, sementara kami di sini memberikan kebijakan dan program kerja.... Atau suatu saat dapat digulirkan kebijakan pada jumlah tertentu anak putus sekolah di suatu sekolah, maka kepala sekolahnya mendapatkan *reward* negatif....

Kami sendiri dalam merumuskan visi, misi, selanjutnya program kerja harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah...tidak hanya asal kerja saja agar koordinasi dapat berjalan dengan seluruh organisasi publik yang ada....

Lebih lanjut dapat dimaknai hasil wawancara tersebut, bahwa rendahnya pendidikan orang tua dapat berimplikasi pada keputusan yang salah arah atas pendidikan anaknya, bahkan pada aspek yang lebih luas. Pendidikan yang rendah berdampak pada kesadaran, sikap dan perilaku yang tidak mengarah pada perbaikan. Orang tua yang berada pada kondisi tersebut relatif akan mewariskan pendidikan yang lebih rendah pada anaknya, karena tidak menyadari makna penting pendidikan dalam kehidupan ekonomi, sosial dan lainnya. Pembelajaran dari lingkungan dengan memperhatikan orang sukses tidak terjadi, sehingga apa yang dijalani dalam kehidupannya dinyatakan sebagai nasib belaka.

Kondisi yang akan dialami oleh generasi selanjutnya, pada keluarga yang tidak menyadari arti pentingnya pendidikan akan semakin terpuruk. Pada periode yang akan datang semua bentuk pekerjaan membutuhkan pengetahuan, bahkan persyaratan pendidikan. Alternatif menjadi TKI pada periode yang akan datang membutuhkan pendidikan yang memadai, sehingga tidak bekerja pada sektor non formal atau ada dasar keterampilan dalam bekerja, bukan sebatas mengandalkan tenaga. Hal ini ditegaskan oleh Kasubag Program pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat (wawancara tanggal 5 Januari 2012), sebagai berikut :

Permasalahan yang kita hadapi dalam pendidikan ini sangat kompleks, tetapi yang terutama adalah kesadaran mengenai makna penting pendidikan untuk kehidupan. Apapun pekerjaan yang akan dipilih, pendidikan menjadi penentu. Ada pekerjaan, punya pendapatan, diperlukan pengetahuan untuk mengelola atau mengatur pendapatan. Menjadi TKI diharapkan akan mengirim yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan, sehingga daya saing, harkat dan martabat mereka tidak diinjak di negara tujuan.

Kesadaran atas peran penting pendidikan pada keluarga dengan dasar pendidikan orang tua yang rendah menjadi tugas semua pihak, termasuk pada manajemen sekolah yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau peserta didik. Konteks ini dapat dilihat pada keluarga dengan orang tua yang mempunyai dasar pendidikan tinggi akan berupaya keras dengan cara mengeluarkan uang yang cukup besar guna memberikan pendidikan pada lembaga yang berkualitas, terlebih jika pendidikan dijalankan dengan konsep gratis. Kondisi ini terjadi, karena para orang tua sadar bahwa hanya melalui pendidikan yang tinggi akan diperoleh kehidupan ekonomi, sosial yang baik, bukan semata menjadi pegawai.

Sumber daya manusia akan muncul sebagai potensi jika mempunyai keseimbangan antara jumlah dan kualitas. Kualitas dalam makna kesesuaian antara pemilikan pengetahuan, keterampilan dan skill agar dapat mengelola sumber daya lainnya. Negara mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi dan menciptakan kondisi tersebut, karena termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bahwa fungsi dan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Konsep besar tersebut dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 dan secara spesifik implementasi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Strategi dan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mewujudkan kualitas SDM. Dalam taraf awal dilakukan melalui penuntasan wajar sembilan tahun. Fakta empiris di setiap daerah permasalahan tersebut masih ada, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Kondisi yang ada dipastikan akan menyebabkan kualitas SDM yang dimiliki masih rendah, berdampak pada permasalahan yang kompleks. Wajar sembilan tahun belum

tuntas, dibuktikan dengan banyaknya siswa umur sekolah sembilan tahun tersebut mengalami *drop out* dan umur masuk sekolah belum masuk sekolah dasar. Kabupaten Lombok Barat dengan hak otonomnya dalam perumusan strategi dan kebijakan diharapkan mampu memecahkan permasalahan belum tuntasnya pendidikan sembilan tahun. Hal tersebut diperkuat dengan kebijakan dan alokasi dana APBD yang tepat sasaran. Seleruhnya memerlukan kajian yang mendalam sebagai dasar dalam memberikan saran dan masukan untuk perbaikan.

B. Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat Periode 2010-2014.

Kajian ini untuk memberikan informasi atas rencana kerja strategis Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, dalam melakukan pada sektor pendidikan, pemuda, olahraga dan seni. Pada periode 2010-2014 visi yang dibangun adalah “terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai patuh patuh patju, yang berorientasi pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan serta agama, sosial dan budaya”. Visi ini dapat dinyatakan lebih luas dari periode lima tahun sebelumnya, karena pada periode tersebut hanya menjadikan organisasi sebagai upaya pembentukan kesejahteraan masyarakat (Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat periode 2010-2014).

Visi tersebut dibangun atas dasar tuntutan dari rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Barat, yang tentunya sebagai pengejawahan dari pembangunan jangka menengah Provinsi NTB. Pembangunan pendidikan tidak hanya diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia, tetapi lebih kompleks, yaitu

pembangunan manusia seutuhnya. Artinya riset yang dilakukan dalam penelitian ini hanya sebagai bagian dari peran Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dalam penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Perspektif pembangunan yang dijalankan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, 2010-2014) adalah :

1. Perspektif sosial; dilahirkan insan-insan berpendidikan yang memberikan kontribusi atas perubahan sosial di dalam masyarakat.
2. Perspektif budaya; pendidikan sebagai wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasi nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat.
3. Perspektif ekonomi, pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi nasional.
4. Perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Aspek penting yang menjadi perhatian untuk diwujudkan adalah pendidikan untuk semua, dalam terapan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkeadilan gender, pendidikan keaksaraan, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pendidikan bagi semua warga negara.

Pelaksanaan visi dan perspektif pendidikan, dilakukan kajian atas potensi internal dan kelemahan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Analisis aspek internal dan eksternal ini diubah oleh Dinas terkait pada analisis input, proses dan output dari sektor pendidikan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasi.

Kualitas pendidikan dapat terwujud, jika input proses pembelajaran memenuhi syarat. Di kabupaten Lombok Barat untuk pendidikan dasar menghadapi permasalahan kualitas input yang masih dicirikan oleh kondisi kesehatan anak yang rendah. Anak di awal persiapan umur sekolah dihadapkan pada permasalahan

kekurangan gizi, cacangan dan sejenisnya, yang menyebabkan anak mempunyai intelegensi yang rendah. Jelas aspek ini harus ada koordinasi kerja dengan dinas kesehatan, sehingga syarat kesehatan balita, bahkan semasa masih dalam kandungan harus baik agar input dalam proses pembelajaran dasar memnuhi syarat standar.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam proses pembelajaran wajar lainnya adalah :

1. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraan pendidik yang belum memadai
2. Prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal
3. Biaya pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, serta
4. Proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif (Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, 2011).

Aspek khusus yang berhubungan dengan guru bukan saja pada aspek kuantitas, tetapi kualitas dan komitmen dalam melakukan proses pembelajaran yang berkualitas. Kualitas guru menjadi rendah, jika proses pembelajaran yang dibina tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini disebabkan adanya kekurangan guru pada jenis pelajaran tertentu. Aspek lainnya adalah upaya untuk memenuhi proses pembelajaran pada setiap guru minimal 24 jam dalam satu minggu.

Prasarana dan sarana belajar masih minim pada sekolah dasar (wajar sembilan tahun; SD dan SMP), terutama pada banyaknya ruang belajar yang rusak, tidak tersedianya perpustakaan, tidak tersedianya laboratorium serta kondisi lain yang berdampak pada ketidaknyamanan pada proses pembelajaran, baik di musim kemarau, karena kepanasan atau musim penghujan, karena atap yang bocor.

Prasarana dan sarana belajar yang sifatnya memberikan dukungan untuk mewujudkan kualitas output sangat penting, seperti keberadaan perpustakaan dan laboratorium. Keberadaan dua prasarana ini sangat penting, baik pada tingkat sekolah dasar ataupun SMP, terlebih pada jenjang yang lebih tinggi.

Sarana penting dalam era otonomi untuk pembelajaran, mengharuskan adanya kegiatan pengiraman data ke pusat atau kegiatan lainnya menyebabkan perlunya aplikasi informasi teknologi dalam pendidikan. Penerapan informasi teknologi pada bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Barat cukup tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

Aspek penting dalam proses pembelajaran adalah ketersediaan dana yang mencukupi. Hal yang menjadi permasalahan dana untuk pendidikan di Kabupaten Lombok Barat adalah kecukupan dan alokasi penggunaan dana. Aspek ini juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini, terkait ketepatan alokasi dana yang menyebabkan permasalahan dapat dituntas sesuai dengan skala prioritas.

Aspek terakhir adalah efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa pada sekolah dasar dan SMP yang masih tinggi. Dapat memberikan indikasi yang sangat jelas, bahwa pembelajaran belum tuntas, berarti proses pembelajaran belum berjalan dengan efektif. Sisi lain, organisasi yang berada pada jenjang lebih tinggi dari organisasi sekolah belum dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, kebijakan umum yang diterapkan adalah :

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kebijakan yang diterapkan berupa :
 - Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar.
 - Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar baik pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan *unit cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian subsidi biaya personal terutama bagi siswanya berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (*formula-based funding*) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.
 - Membentuk SD-SMP satu atap/sekolah pendidikan dasar terpadu, bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar dalam kebijakan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD untuk mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan atau dengan meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat mengajar di SMP. Selain itu, dilakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, baik ruang kelas maupun bangunan sekolah dengan membuat jaringan sekolah antara SMP dengan SD-SD yang ada di wilayah layanannya (*catchment areas*) serta menggabungkan SD-SD yang sudah tidak efisien lagi.
 - Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/ inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung dan pengembangan SMP Terbuka model maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.

- Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal.
 - Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain dikembangkan SMA terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.
 - Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.
 - Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah terpencil dan daerah tertinggal, serta mengimplementasikannya dalam berbagai program secara terpadu.
 - Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi (KIE), serta advokasi kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan serta mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.
 - Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif selain menggunakan modul atau tutorial, terutama bagi daerah terpencil dan mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang penduduk.
2. Penciptaan mutu, relevansi dan daya saing, kebijakan yang diterapkan adalah :
- Mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan PP SNP No. 19/2005, sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.
 - Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi siswa berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (*benchmark*). Hasil ujian nasional tidak merupakan satu-satunya alat untuk menentukan

- kelulusan siswa pada setiap satuan pendidikan tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.
- Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya yang dimaksudkan untuk menentukan faktor penguangkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antar-satuan pendidikan, atau melalui pengelompokan lainnya.
 - Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan status akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut. Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu setiap satuan atau program pendidikan. Pelaksanaan akreditasi ini akan dilakukan secara independen oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF).
3. Penciptaan pengelolaan yang baik, akuntabilitas dan pencitraan publik, kebijakan yang diterapkan adalah :
- Program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan
 - Reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas
 - Perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran *stakeholder* yang lebih luas.

Strategi yang dijalankan tentu sesuai dengan kebijakan umum yang telah dirumuskan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Berbagai kebijakan umum tersebut akan dapat memecahkan permasalahan yang ada, apabila diterapkan program kerja yang memadai. Adapun rencana program yang dijalankan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat berupa :

1. Pemerataan dan Akses Pendidikan

Program kerja yang dijalankan periode 2010-2014 adalah :

- a. Sosialisasi wajar dikdas 9 th; tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan pemahaman bagi masyarakat tentang wajar dikdas. Sasaran kerja pada seluruh lapisan masyarakat dengan dana sebesar Rp.160.000.000. Indikator capaian hasil berupa pemahaman masyarakat atas wajib belajar sembilan tahun.
- b. Membangun USB dan RKB TK, SD dan SMP. Sasaran kerja berupa mendekatkan pelayanan kepada peserta didik dan meningkatkan daya tampung anak. Total dana yang disiapkan sebesar Rp.9.280.000.000, dengan perincian :
 - Delapan USB TK dengan jumlah dana Rp.4.000.000.000
 - Enam USB SMP dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp.72.000.000.000
 - 142 RKB SD dengan dana anggaran sebesar Rp.9.940.000.000
 - 162 RKB SMP dengan anggaran sebesar Rp.11.340.000.000
- c. Rehab RKB TK; mdengan sasaran untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan belajar. Volume kegiatans ebnayak 40 unit dengan dana anggaran sebesar Rp.1.000.000.000.
- d. Menambah fasilitas belajar di SD dan SMP, dengan sasaran meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mendekatkan pelayanan anak usia sekolah.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp.44.795.000.000. Perincian kerjanya sebagai berikut :

Tabel 4.5. Kegiatan dan Jumlah Dana untuk Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pembelajaran oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat Periode 2010-2014.

No.	Kegiatan	Unit	Nilai Anggaran (Rp)
1.	Lab. IPA	8	1.000.000.000
2.	Lab. Bahasa	8	1.000.000.000
3.	Ruang Multi media	8	1.000.000.000
4.	Lab. PSB	20	2.080.000.000
5.	Ruang Perpustakaan	323	33.915.000.000
6.	Media pembelajaran lainnya	60	600.000.000
Total			44.795.000.000

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, 2011.

Total dana yang dianggarkan untuk mewujudkan kegiatan pemerataan dan akses pendidikan di Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.143.235.000.000. Rencana program kerja yang disesuaikan dengan kebijakan umum Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat adalah Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

2. Efektivitas dan Efisiensi Pendidikan.

Kegiatan yang dijalankan dikhususkan pada sekolah yang belum memiliki IT, tidak dilakukan secara spesifik pada tingkat dasar atau pada jenjang yang lebih tinggi (SMA/SMK). Efisiensi dan efektivitas pembelajaran berhubungan dengan proses pembelajaran yang dapat berjalan dengan baik, sehingga kualitas output semakin tinggi. Indikator penting adalah pencapaian tingkat kelulusan yang lebih tinggi.

Kegiatan yang dijalankan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Kegiatan dan Jumlah Dana untuk Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pembelajaran oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat Periode 2010-2014.

No.	Kegiatan	Unit	Dana (Rp)
1.	Pengadaan alat-alat bermain TK	40	1.000.000.000
2.	Pengadaan Perangkat IT	10	1.000.000.000
3.	Pengadaan Alat-alat Laboraturium	68	2.040.000.000
4.	Pengadaan Alat Bantu Sederhana	40	200.000.000
5.	Pengadaan Laboraturium Bahasa	8	1.760.000.000
6.	Pengadaan Alat-alat Laboraturium IPA	20	600.000.000
7.	Pengadaan Alat-alat Multimedia	4	360.000.000
8.	Pengadaan Alat-alat PSB	4	416.000.000
9.	Pengadaan Perangkat Lunak Media Pembelajaran	40	200.000.000
Total			7.576.000.000

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, 2011.

Adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal penting yang perlu dipertegas adalah wajar dikdas sembilan tahun bukan hanya memperhatikan aspek kuantitas, tetapi kualitas pembelajaran.

3. Peningkatan Mutu dan Relevansi

Jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.14.318.000.000. Peningkatan mutu dan relevansi ini dihubungkan dengan strategi tingkat provinsi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing tinggi.

Perincian kegiatan, volume dan dana yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabuapten Lombok Barat, sebagai berikut :

Tabel 4.7. Kegiatan dan Jumlah Dana untuk Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat Periode 2010-2014.

No.	Kegiatan	Unit	Dana (Rp)
1.	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru	3508	8.770.000.000
2.	Peningkatan Kompetensi dan Skill Guru serta pengawas	32	800.000.000
3.	Pemberdayaan KKG dan MGMP	68	680.000.000
4.	Pemberdayaan MKKS, KKKS, KKPS dan MKPS	16	160.000.000
5.	Memfasilitasi Pembentukan TK Model Percontohan	4	200.000.000
6.	Sertifikasi Guru	4	100.000.000
7.	Pemberdayaan Konsorsium	16	320.000.000
8.	Implementasi Lesson Study	16	320.000.000
9.	PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan)	8 Gugus	480.000.000
10.	Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas, Laboran, dan Pustakawan Berprestasi	4	100.000.000
11.	Lomba Karya Tulis Ilmiah, Fiksi dan Non Fiksi bagi Guru dan Kepsek	4	48.000.000
12.	Kemitraan Kepsek	16	160.000.000
13.	Kontrak kerja program kepala sekolah dengan kepala dinas	4	100.000.000
14.	Pengembangan Kurikulum Terpadu	4	180.000.000
15.	Pemberdayaan tim pengembang kurikulum	32	800.000.000
16.	UN/ US SMP/ MTs dan UASBN/ UAS SD/ MI	4 paket	1.100.000.000
	Total		14.318.000.000

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, 2011.

Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang telah dipilih oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat bersumber dari APBD dan APBN. Berbagai kegiatan tersebut akan diusulkan pada tahun kerja terkait dengan menetapkan jumlah pagu dan indikator pencapaian yang jelas. Dana tersebut akan terealisasi melalui pembagian pada setiap SKPD dari APBD kabupaten Lombok Barat serta kemampuan dalam melakukan lobi kegiatan untuk menyerap dana yang bersumber dari APBN, tentu melalui kementerian pendidikan.

Berbagai program kerja tersebut telah menjadi program kerja yang diajukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam perannya sebagai pihak SKPD

yang masuk dalam program kerja dan pagu nominalnya sebagai pembentuk APBD Kabupaten Lombok Barat. Berhubungan dengan hal tersebut, setiap akhir tahun akan terjadi evaluasi, baik dalam penggunaan dana ataupun realisasi program kerja yang direncanakan.

4. Tata Kelola (Manajemen)

Manajemen mempunyai peran penting pada setiap lembaga, termasuk organisasi publik. Terapan manajemen ini memberikan dukungan atas realisasi tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen pada prinsipnya menjalankan aktivitas mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi, sehingga langkah aktual yang dijalankan organisasi tidak mengalami bias yang tinggi dari tujuan awal yang telah ditetapkan.

Pembelajaran manajemen untuk kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat bukan hanya pada internal organisasi, tetapi juga eksternal organisasi yang secara langsung menjalankan proses pembelajaran (organisasi sekolah). Terapan manajemen pada organisasi sekolah sangat diperlukan, terlebih pada implementasi dari manajemen berbasis sekolah.

Program kerja yang dijalankan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat untuk aspek manajemen atau tata kelola organisasi pendidikan sebagai berikut.

Tabel 4.8. Kegiatan dan Jumlah Dana untuk Kegiatan Tata Kelola Organisasi oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat Periode 2010-2014.

No.	Kegiatan	Unit	Dana (Rp)
1.	Pendampingan Implementasi MBS	8	200.000.000
2.	Implementasi TQM (Total Quality Management)	4 Pket	260.000.000
3.	Lomba Sekolah Sehat, Bersih dan Indah (TK, SD, SMP) (Masuk POS)	12	144.000.000
4.	Pemberian <i>Education Award</i>	4	400.000.000
5.	Memfasilitasi Terwujudnya sekolah berstandar Internasional (SBI) dan sekolah standar Nasional (SSN)	64	256.000.000
6.	Pelaksanaan Akreditasi sekolah	4	40.000.000
7.	FGD (Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, stakeholder lainnya)	4 gugus	200.000.000
8.	Monitoring dan evaluasi program	4	60.000.000
	Total		1.560.000.000

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, 2011.

Total dana yang dianggarkan untuk kegiatan tata kelola oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.1.560.000.000. Kerja yang berbasis pada tata kelola ini diharapkan dapat bermakna dalam penciptaan proses pembelajaran dan peningkatan kualitas output.

Penekanan tersebut diperlukan, karena berbeda dengan program kerja yang mengarah pada penyediaan sarana dan prasarana atau aspek yang bersifat fisik dapat langsung dilihat hasilnya. Berbeda dengan kegiatan tersebut, dapat saja tidak terlihat dengan jelas kegiatan dan hasilnya. Misalnya kegiatan FGD (*focus group discussion*), dianggarkan dana sebesar Rp.200.000.000. Pada sisi lain, bermakna atau tidak hasil dari FGD tersebut perlu peninjauan lebih lanjut.

Berbagai uraian kerja tersebut untuk periode 2010-2014, di mana dana yang dianggarkan sebesar Rp.166.689.000.000 atau rata-rata per tahun sebesar Rp.33.337.800.000. Apabila dihubungkan dengan dana yang direalisasikan pada

tahun 2009 sebesar Rp.30.455.717.287, berarti terjadi peningkatan sebesar Rp.2.882.082.713 (informasi realisasi dana pada tahun 2009 ditampilkan pada Lampiran 1). Peningkatan dana untuk mendukung program kerja pada periode 2010-2014 mengalami peningkatan, sehingga hasil yang dicapai harus mengalami peningkatan.

Permasalahan eksternal oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat relevan dengan belum tuntasnya wajar sembilan tahun, yaitu prasarana pembelajaran yang belum optimal, biaya pendidikan dan ketersediaan tenaga pendidik, khususnya di daerah-daerah terpencil. Aspek lain yang belum dianalisis secara mendalam, dihubungkan dengan kondisi eksternal adalah kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan sebagai dasar pengubah kehidupan dan ekonomi sosial masyarakat (generasi penurus). Hal ini mempunyai kemiripan dengan hasil penelitian Hanye, dkk (2010), bahwa dukungan masyarakat dalam menuntaskan wajar sembilan tahun belum optimal, terbukti dengan adanya putus sekolah pada tingkat SD dan SMP. Apabila dihubungkan dengan pembayaran SPP atau sejenisnya, pemerintah telah menetapkan BOS. Aspek ekonomi keluarga cenderung menjadi masalah, di mana anak dilibatkan juga dalam kegiatan ekonomi keluarga. Aspek penting yang perlu dengan segera dipercepat pencapaiannya adalah kesempatan kerja yang lebih baik dan penciptaan kondisi ekonomi yang lebih baik. Penciptaan kesempatan kerja yang luas merupakan peran pemerintah, diharapkan dalam era otonomi daerah akan semakin cepat, karena adanya pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan akar permasalahan di masyarakat. Konsep yang diajukan oleh Nasirin dan Leonardo (2010) dalam pembangunan yang mengacu pada pendapat Cheema dan Rondenell

perlu dijalankan, karena selama ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjalankan kegiatan yang sifatnya tidak menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan tidak tuntasnya wajar sembilan tahun.

Renstra berhubungan dengan penetapan tujuan dan langkah kerja yang diambil dengan periode waktu jangka panjang. Secara spesifik dalam hubungannya dengan penuntasan wajar sembilan tahun mempunyai relevansi dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Konteks ini masih sebagai rencana kerja jangka panjang, sementara dilihat dari kegiatan yang dilakukan relatif belum menyentuh permasalahan yang menyebabkan belum tuntasnya wajar sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat. Penuntasan wajar sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat masih belum fokus, karena kebijakan yang diimplementasikan hanya sebagian kecil yang sifatnya menyentuh akar permasalahan.

Strategi yang dijalankan oleh setiap SKPD harus menciptakan peningkatan atau perbaikan kondisi, setidaknya hal tersebut sebagai makna dari strategi (Rangkuti, 2001:4). Telaah atas kondisi internal dan eksternal tergolong tepat dilakukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, tetapi yang menjadi permasalahan adalah rumusan dari strategi yang dijalankan masih bersifat rutinitas, tidak fokus pada penyelesaian suatu masalah secara bertahap pada setiap periode. Kondisi ini dapat dinyatakan sebagai kelemahan seluruh organisasi publik, karena alokasi anggaran selalu diberikan pada setiap kegiatan, tanpa memberikan porsi khusus pada permasalahan yang sifatnya mendasar.

Permasalahan pendidikan, secara khusus pada masalah belum tuntasnya wajar sembilan tahun, maka rumusan strategi yang dijalankan dapat mengikuti atau

memperhatikan tingkatan (level) strategi budaya (*culture*) dengan *culture strategy*, tentu dengan penguatan organisasi terlebih dahulu (Osborne dan Plastrik, 1997). Para perumus strategi di Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat perlu membekali diri dengan kemampuan konsep berpikir dalam perumusan strategi, bukan menjalankan strategi yang sifatnya rutinitas. Dalam era otonomi daerah, sangat diperlukan kemampuan setiap SKPD dalam merumuskan strategi, karena campur tangan pemerintah pusat telah dikurangi. Perumusan strategi, implementasi kebijakan mengalami penciutan birokrasi, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih cepat dan lebih fokus pada permasalahan yang ada di masyarakat.

C. Implementasi Kebijakan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kabupaten Lombok Barat

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan apa yang akan dilakukan untuk lima tahun yang akan datang guna menghadapi permasalahan yang ada sekarang (atas dasar data empiris) dan perkiraan kondisi yang melingkupi pendidikan pada periode yang akan datang. Visi yang dijalankan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat tidak selalu konstan, terbukti pada tahun 2007 visi yang dijalankan adalah “terwujudnya peningkatan kualitas SDM Kabupaten Lombok Barat melalui pendidikan yang bermutu” (Kasubag Program Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, wawancara tanggal 9 Januari 2012).

Visi yang dibangun oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat akan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat serta adopsi dalam rangka penyesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah

daerah. Hal terakhir ini sangat tergantung dari janji politik yang diberikan oleh kepala daerah terpilih.

Pada uraian sebelumnya telah diberikan penjelasan atas program kerja yang dijalankan, terutama untuk lima tahun yang akan datang (periode 2010-2014). Berbagai dana tersebut sifatnya biaya langsung yang dikelola oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, bukan termasuk biaya tidak langsung (gaji dan sejenisnya).

Adapun data empiris pada periode 2007-2011, jumlah biaya langsung yang dikelola oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Tabel 4.9. Biaya Langsung yang Dikelola Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat Periode 2007-2011.

Tahun	Jumlah Dana (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase Perubahan (%)
2007	47.068.860.513,62		
2008	41.036.355.771,00	-6.032.504.742,62	-12,82
2009	30.208.472.762,00	-10.827.883.009,00	-26,39
2010	37.922.758.750,00	7.714.285.988,00	25,54
2011	43.716.279.090,00	5.793.520.340,00	15,28
Raa-rata	39.990.545.377,32	-838.145.355,91	0,40

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2011

Informasi pada tabel tersebut menunjukkan dana yang dikelola oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan yang cukup tinggi secara berturut-turut, tetapi pada periode 2010 dan 2011 mengalami peningkatan. Berdasarkan data empiris tersebut diketahui bahwa seolah terjadi peningkatan jumlah dana yang dikelola, rata-rata sebesar 0,40 persen.

Fakta yang perlu diperhatikan adalah dana langsung yang dikelola pada tahun 2011 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan dana yang dikelola pada tahun 2007. Permasalahan pendidikan yang ada sekarang jauh lebih kompleks dari periode

sebelumnya, karena dibutuhkan dana yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan eksternal.

Lebih jauh perlu dilakukan penggalan atas jumlah dana langsung yang dikelola oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat diperuntukkan pada penuntasan wajar dikdas sembilan tahun. Pada tahun 2009 (sesuai Lampiran 9) dapat dilihat bahwa dana yang dialokasikan untuk program kerja yang berhubungan dengan wajar dikdas sembilan tahun sebesar Rp. 23.337.979.212 atau sebesar 76,63 persen dari total dana yang dikelola untuk biaya langsung pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan yang dijalankan pada tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 4.10. Alokasi Dana untuk Wajar Dikdas oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009.

No.	Urusan	Sasaran	Alokasi Dana (Rp)
1	Peningkatan Mutu dan Rehab bangunan sekolah	Rehab Gedung sekolah dan Mutu DAK	21.448.900.000
2	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	Pembiayaan pengembangan sekolah	1.097.354.712
3	Operasional TK, SLB SKB dan SMP	Operasional sekolah (rutin)	791.724.500
Total			23.337.979.212

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, tahun 2009.

Pada tahun 2009 kegiatan aktual yang dijalankan untuk wajar dikdas sembilan tahun kegiatan rehab, pengembangan sekolah dan operasional sekolah secara rutin, di mana komposisi biaya terbesar adalah rehab gedung. Pada tahun 2010-2014 telah diberikan uraian atas anggaran kerja yang secara spesifik untuk memecahkan masalah dikdas sembilan tahun, yaitu lebih banyak fokus pada kegiatan fisik, walaupun ada kegiatan untuk melakukan sosialisasi wajar dikdas sembilan tahun pada masyarakat.

Hal penting yang menjadi permasalahan adalah kondisi wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat masih belum terealisasi, dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka partisipasi sekolah yang masih rendah serta tingginya angka putus sekolah. Pada tahun 2010 jumlah anak SD yang mengalami putus sekolah sebanyak 427 orang, sedangkan pada tingkat SMP sebanyak 224 orang, terjadi pada gender laki-laki dan perempuan dengan kondisi yang relatif berimbang.

Fakta tersebut memberikan pembuktian bahwa anak usia sekolah pada wajar dikdas sembilan tahun semakin tinggi dengan menghitung lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah dan anak umur sekolah SD yang belum masuk sekolah. Fakta ini perlu dicarikan selolusi, bukan mengandalkan kegiatan rutinitas serta fokus pada penyediaan gedung belajar semata atau melakukan pembelajaran dengan sistem satu atap.

Ada permasalahan yang sifatnya esensial, bukan sebagai akibat dari kurangnya gedung sekolah, tetapi akibat kesadaran masyarakat atas pentingnya sekolah. Hal ini telah diperhatikan pada rencana program kerja pada tahun 2010-2014, di mana harus menjadi realisasi. Pihak manajemen Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat melakukan sosialisasi, tentu dalam sosialisasi tersebut perlu juga ditemukan permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat sebagai penyebab terjadinya putus sekolah atau tidak masuk sekolah pada umur sekolah dasar.

Berhubungan dengan berbagai kebijakan aktual yang telah dilakukan pada periode 2009-2010, pihak pejabat di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat memberikan penilaian bahwa masih terdapat tugas berat yang diemban, karena

wajar dikdas sembilan tahun masih belum tuntas. Berikut dilakukan wawancara dengan para pejabat yang bertugas sebagai pembuat rencana kerja.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat (wawancara tanggal 3 Januari 2012) memberikan informasi mengenai strategi dan aspek lain yang berhubungan dengan kebijakan SKPD-nya, sebagai berikut :

Organisasi publik yang membidangi pendidikan di Kabupaten Lombok barat adalah Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, tentu permasalahan pendidikan menjadi urusan utama kami. Dalam praktek kerja, yang sifatnya berhubungan langsung dengan proses pembelajaran adalah sekolah-sekolah, bahkan ada dalam naungan kerja kementerian agama, tetapi tentu kita lakukan koordinasi.

Bukan hendak mengurangi tanggung jawab pada sektor pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, tetapi pendidikan berhubungan dengan ekonomi dan kesehatan, maka optimalisasi peran dinas terkait serta koordinasi sangat diperlukan.

Wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat belum tuntas, kami tidak bisa mengelak dengan adanya data statistik. Pada periode yang akan datang kami mencoba melalui upaya maksimal dalam meningkatkan kesempatan, pemerataan pendidikan, dengan lebih mengoptimalkan dana BOS, sekolah dasar dan SMP yang satu atap dan lainnya.

Sumbangan pemikiran para pakar dan praktisi pendidikan juga sangat kami harapkan, karena selama ini kami juga bekerja dengan melakukan terobosan-terobosan, tapi fakta adanya masyarakat di pelosok, alasan ekonomi dan lainnya yang menyebabkan terjadinya putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah pada jenjang SMP.

Dapat saya katakan...Depnaker pada saat memberikan pelatihan pada para TKI juga memberikan penekanan agar mereka meningkatkan pendidikan anak-anak atau generasi penurusnya dengan menyatakan bahwa pada periode yang akan datang untuk menjadi TKI saja diperlukan pendidikan yang lebih tinggi, atau pemerintah tidak akan mengirim TKI, TKW yang hanya berpendidikan sekolah dasar.

Kami perlu masukan, silahkan para pakar melakukan riset mendalam termasuk alternatif kebijakan untuk menuntaskan masalah dikdas sembilan tahun.

Pimpinan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya telah melakukan berbagai alternatif strategi untuk menuntaskan masalah wajar dikdas

sembilan tahun. Pihak pimpinan juga membuka diri dan diperlukan koordinasi dengan organisasi publik lainnya serta menerima masukan dari para pakar untuk mencari solusi pengentasan masalah wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Kasubag Program di Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat (wawancara tanggal 2 Januari 2012), berikut pendapatnya mengenai implementasi kebijakan untuk penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat :

Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dalam lingkup otonomi daerah dapat saya katakan sangat kompleks. Program yang dirumuskan disesuaikan dengan pemilikan sumber daya. Saya informasikan pada tahun 2009 biaya langsung untuk memecahkan masalah pendidikan atau yang menyentuh permasalahan sebesar Rp.30.208.472.762 dari Rp.211.869.861.020,64 atau sekitar 14,26 persen. Pada tahun 2010 biaya langsung sebesar Rp.37.922.758.750 dari total sebesar Rp.290.180.823.521,52 atau sekitar 13,07 persen dan pada tahun 2011 sebesar Rp.43.716.279.090 dari Rp.313.841.0147.543,94 atau sekitar 13,93 persen (beliau memegang catatan dana alokasi APBD untuk Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat).

Kita ini sudah salah atau bagaimana saya tidak tahu...anggaran dominan untuk belanja aparatur, sementara untuk pembangunan atau dana untuk dikelola dalam rangka memecahkan permasalahan relatif terbatas.

Pada kondisi yang demikian, program yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kondisi keuangan. Tidak mungkin kita emmbuat program yang tidak masuk akal. Saya nyatakan demikian, karena ini juga masalah ekonomi keluarga dari anak didik, sambil bekerja, tidak ada harapan dalam pendidikan dan akhirnya memilih putus sekolah atau cukup sampai sekolah dasar.

Akhirnya bekerja di sektor pertanian, jadi buruh bangunan, TKI ilegal dan lainnya. Akan tetapi, semoga dengan berjalannya waktu dana semakin besar, masyarakat semakin sejahtera dan sadar makna pendidikan dan semoga pendidikan mendapatkan tempat dalam mendapatkan pekerjaan, bukan KKN atau sejenisnya.

Pernyataan tersebut pada dasarnya memberikan indikasi bahwa pencapaian wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat masih belum tuntas.

Penekanan permasalahan diberikan pada alokasi dana yang dikeluarkan atau anggaran yang ada serta peran dari semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mengenai arti pentingnya pendidikan. Perlu upaya menyadarkan perjuangan yang dilakukan orang tua saat ini untuk mengubah masa depan putra putrinya melalui pendidikan.

Kasubag Keuangan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat (wawancara tanggal 3 Januari 2012) memberikan pernyataan atas implementasi kebijakan yang berhubungan dengan pengentasan masalah wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Tergantung pada bagaimana kita memberikan pandangan. Apabila dihubungkan dengan data empiris, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi sekolah anak usia sekolah wajar dikdas sembilan tahun terjadi peningkatan. Akan tetapi jika dihubungkan aspek pendidikan tersebut sebagai pemberi kontribusi penciptaan IPM dan dibandingkan dengan daerah lain, maka dipastikan pencapaian Kabupaten Lombok Barat tergolong rendah.

Saya lebih memberikan pandangan bahwa harus dibandingkan dengan daerah lain, karena bagaimanapun harus menciptakan potensi masyarakat Kabupaten Lombok Barat sebagai bagian dari Provinsi NTB untuk mempunyai sumber daya manusia yang bersaing.

Kebijakan, program atau rencana kerja secara keseluruhan serta hasil yang direncanakan atau tujuan mutlak tergantung pada ketersediaan dana serta inovasi dalam penciptaan program kerja.

Kebijakan dan program kerja yang dicanangkan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat atas kerja semua pihak, dalam membuat kebijakan tersebut kita bgali potensi dan hambatan yang ada di masyarakat. Program kerja yang kita pilih disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan dana.

Sifat dana terbatas (*scarcity*)...itu yang kita bagikan pada semua bentuk kegiatan yang ada, tidak bisa hanya untuk wajar dikdas sembilan tahun, karena semua tufoksi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat harus jalan.

Kembali pada masalah wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat masih perlu upaya yang kuat dan mari kita bekerja bersama

Kasubid Kurikulum (wawancara pada tanggal 6 Januari 2012) berikut hasil wawancaranya mengenai implementasi kebijakan wajar dikdas di Kabupaten Lombok

Barat :

Setiap bidang mempunyai tufoksi sendiri, begitu juga dengan wajar dikdas sembilan tahun. Walaupun demikian, kami sebagai sub sistem dari organisasi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat melakukan koordinasi satu dengan lainnya, serta kita juga memberikan perhatian pada pencapaian hasil kerja organisasi secara keseluruhan.

Data statistik melalui input data dari Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat diinformasikan pada publik atas capaian wajar dikdas sembilan tahun. Kondisi yang ada masih banyak anak putus sekolah dan tidak melanjutkan dari jenjang SD ke jenjang SMP, sehingga menambah permasalahan atas kondisi capaian wajar dikdas sembilan tahun tersebut.

Fakta ini memberikan saya menyatakan wajar dikdas sembilan tahun dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat belum dapat dinyatakan berhasil.

Salah satu pejabat di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat

(Rasyid, wawancara tanggal 9 Januari 2012) menegaskan :

Ada keluarga miskin bersusah payah untuk memberikan pendidikan pada anaknya, segala cara dilakukan. Perjuangannya sangat berat, tetapi sekolah bagi putra putrinya diupayakan sedemikian rupa, sedikit pernyataannya ... *"ndaq bodo mara' amaq, selengke laiq ndeq te bau andalen tenaga, daet sekedik upaq...anaq harus sekolah"*. Itu pernyataan orang tua yang sadar arti pendidikan, itu jauh sebelum adanya wajar dikdas sembilan tahun. Pendidikan dari zaman dahulu difasilitasi oleh negara diupayakan oleh masyarakat, sekarang tidak manjaintinya malas.

Pada masyarakat yang demikian, apapun kebijakan yang ditempuh, mulai dari sekolah gratis, bahkan diberikan uang pun untuk biaya operasional sekolah anak pasti akan ada kendala.

Kesadaran masyarakat sangat penting,negara mempermudah. Selama ini negara telah mempermudah, walaupun dalam praktek berbagai macam polah guru ada...harus beli buku, baju anak, buku anak tidak boleh menggunakan punya kakak....guru jangan bisnis di anak murid ... mau jadi pebisnis jangan jadi guru...

Rumit masalahnya pak....anda sarjana berasal dari keluarga miskin harusnya mudah cari pekerjaan, fakta pekerjaan susah dicari....jadi pemerintah punya peran yang kompleks juga.....

...

Apa yang telah dijalankan oleh pemerintah selama ini tergolong selalu mengalami peningkatan, tetapi kompleksitas masalah juga semakin tinggi. Guru dalam praktek pembelajaran harus belajar mengenal kondisi murid, sehingga jangan setelah putus sekolah baru dicarikan solusi...maksimalkan pertemuan guru dengan wali murid, sehingga permasalahan pendidikan murid dapat diketahui...Sekolah satu atap, aplikasi BOS dan lainnya tergolong telah tepat sasaran, tetapi mungkin ada faktor eksternal lain yang lebih kuat menyebabkan capaian wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat belum optimal.

Informasi tersebut juga memberikan pernyataan bahwa wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat belum optimal, karena data statistik telah memberikan informasi atas hal tersebut. Hal penting yang disampaikan adalah peran keluarga atau orang tua yang sadar atas arti penting pendidikan, pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam proses pendidikan. Hal terpenting agar bermaknanya perjuangan masyarakat adalah bagaimana proses pendidikan yang telah ditempuh memberikan kemudahan dalam mencari pekerjaan.

Kasi Kelembagaan Bidang PNFI (wawancara tanggal 11 Januari 2012), berikut informasinya :

Sebenarnya kesadaran menjadi masalah kesuksesan pendidikan, termasuk wajar dikdas sembilan tahun. Pantauan secara dini pada suatu wilayah dapat dilihat dari semangatnya dalam memberikan pendidikan pada usia dini....dapat dipastikan bagi keluarga yang memberikan pendidikan anaknya sejak dini, berarti akan memberikan pendidikan pada anaknya semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Sebaliknya, jika pendidikan dini tidak diberikan, maka pada dasarnya perlu diberikan perhatian pada keluarga terkait, dapat saja pendidikan dasar anaknya akan tidak sukses.

.....
Kembali pada permasalahan yang bapak tanyakan mengenai implementasi kebijakan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam menyukseskan wajar dikdas sembilan tahun...

Pemberian dana operasional (BOS), pemeratan sekolah, rehab sekolah dan periode yang akan datang akan adanya sosialisasi (telah dilaksanakan untuk anggaran 2010 dan 2011)...seluruhnya

memberikan makna atas peningkatan implementasi wajar dikdas sembilan tahun, tidak bisa kita bilang tidak berhasil. Pasti ada capaian dengan asumsi dilaksanakan dengan sebenarnya. Akan tetapi jika yang menjadi indikator adalah persentase angka putus sekolah, partisipasi sekolah dan lainnya, maka Kabupaten Lombok Barat masih perlu mengupayakan kebijakan yang lebih bersifat oriented untuk mengatasi masalah putus sekolah pada pendidikan dasar.

.....
Bapak bupati sebagai ahli dalam bidang pendidikan perlu dimintai informasi oleh kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat atau secara langsung segala kebijakan yang ditempuh mengacu pada strategi jangka menengah dan pendek dalam sektor pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Akan tetapi fakta, IPM (dengan salah satu aspeknya pendidikan) memberikan pembuktian semua elemen belum optimal memberikan pemecahan masalah atas implementasi suksesnya wajar dikdas sembilan tahun.

Informasi yang diperoleh dari pejabat di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat seluruhnya memberikan informasi bahwa wajar diksa sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat belum sukses, wujud dari permasalahan yang kompleks, bukan hanya akibat dari kebijakan yang dirumuskan oleh organisasi terkait, tetapi dibutuhkan kerja semua pihak.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat (wawancara tanggal 9 Januari 2012), wawancara dilakukan dengan informan berhubungan dengan kerja yang dijalankan aparatur atas kebijakan dan program yang telah dicanangkan. Tetapi pertanyaan lebih difokuskan, apakah kebijakan dan program yang dijalankan sebatas catatan tersebut kertas kerja, bagaimana aktual pelaksanaannya yang dijalankan oleh aparatur. Berikut hasil wawancaranya :

Kerja yang kami jalankan adalah pengelolaan karyawan atau pegawai...tentu evaluasi juga atas kerja yang dijalankan....saya juga menjawab pertanyaan bapak dengan pernyataan..."organisasi publik mempunyai tufoksi, ada dana yang dikelola, ada pertanggungjawaban". Berbicara pertanggungjawaban selalu ada, jadi tidak dapat dinyatakan bahwa program hanya ada tersebut lembar kerja.

Fakta yang ada permasalahan wajar dikdas sembilan tahun belum tuntas memberikan indikasi bahwa program kerja yang dijalankan masih perlu diperbaiki atau ada variabel error yang bukan menjadi tufoksi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

Dalam rangka melengkapi jawaban tersebut, kembali dilakukan wawancara dengan bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, berikut hasil wawancaranya :

Optimalisasi pada setiap kebijakan dan program menjadi perhatian utama saya sebagai pimpinan. Bapak sangat mengetahui bahwa wajar dikdas sembilan tahun sebagai program nasional...bahkan jika kondisi telah memungkinkan kita bisa meningkatkan target agar wajar dikdas menjadi 12 tahun di Kabupaten Lombok Barat. Tapi fakta menunjukkan bahwa perlu kerja keras untuk meningkatkan partisipasi anak sekolah pada usia wajar dikdas sembilan tahun.

Inti dari program tersebut adalah bagaimana tidak muncul buta aksara, potensi dasar untuk kegiatan ekonomi, sosial ada; bahkan untuk mengatasi masalah tersebut pada usia dewasa kami mempunyai bidang pendidikan non formal, sampai pada pemberian pelatihan juga ada.

...intinya bagaimana masyarakat berperan aktif, mari manfaatkan segala peluang yang ada. Tanpa ada pendidikan masyarakat dalam arti luas, dipastikan kemiskinan, kesehatan yang rendah menjadi momok dalam masyarakat.

Kerja aktual setiap program telah dijalankan, pengarahan dan evaluasi atas kerja aktual yang ada selalu dilakukan, tapi inilah fakta capaiannya.

Berbagai kebijakan dan program kerja telah diuraikan untuk Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, karena seluruhnya ada dalam renstra, baik kerja empiris ataupun untuk kerja lima tahun yang akan datang. Pengenalan masalah melalui analisis internal dan eksternal telah dilakukan, seluruh pihak dalam organisasi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat terlibat dalam penyusunan renstra, termasuk pada kebijakan wajar dikdas disamping ada bidang khusus yang manangani, juga ada koordinasi antar fungsi yang ada.

Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat telah melalui prosedur yang sejalan dengan konsep teori, bahwa terjadi penyesuaian kondisi internal dan eksternal organisasi serta merujuk pada strategi pemerintah daerah (Bastian, 2006). Hal yang menjadi permasalahan adalah kecermatan dalam melakukan temuan permasalahan mendasar atau dapat juga muncul sebagai akibat SKPD terkait harus melakukan pembagian sumberdayanya untuk permasalahan lain, karena penuntasan wajar sembilan tahun bukan hanya menjadi masalah yang *urgen* di daerah terkait, tetapi terdapat masalah lain, seperti rencana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang menyiapkan *output* cepat kerja dan permasalahan lainnya yang sifatnya saling berkaitan.

Era otonomi daerah telah berjalan cukup lama, lebih dari sepuluh tahun. Pada kondisi ini pembelajaran dalam memecahkan permasalahan internal daerah harus telah terjadi. Kerja evaluasi menjadi sangat penting dalam menjalankan fungsi SKPD, karena terkait dengan realisasi dari strategi dan kebijakan yang dijalankan serta penggunaan sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD. Dalam evaluasi kinerja tersebut menjadi dasar untuk perbaikan strategi dan implementasi pada periode selanjutnya, sehingga kualitas output selalu mengalami peningkatan (Mahmudi, 2007:14). Makna dari kondisi ini adalah permasalahan yang dihadapi masyarakat yang menjadi bidang tugas organisasi publik (SKPD) mengalami pengurangan.

D. Pelaksanaan Strategi Alokasi Anggaran untuk Wajar Dikdas Sembilan Tahun oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat

Alokasi dana yang dikelola Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat bersumber dari APBD dan dapat juga bersumber dari dana APBN. Alokasi dana yang bersumber dari APBD digunakan untuk belanja aparatur negara dan belanja pembangunan atau diklasifikasikan dalam biaya tidak langsung (biaya belanja aparatur) dan belanja langsung (belanja pembangunan). Belanja aparatur sifatnya konsumtif, sedangkan belanja yang menyentuh permasalahan masyarakat dalam konteks pembangunan sifatnya adalah non konsumtif.

Permasalahan utama dalam belanja organisasi publik di Indonesia, termasuk juga belanja pada pemerintah pusat, masih didominasi belanja aparatur negara. Hal ini telah diuraikan sebelumnya, termasuk dalam wawancara dengan salah satu nara sumber. Belanja pembangunna atau tidak langsung merupakan sumber belanja untuk alokasi anggaran pada kegiatan meyukseskan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat.

Pada Lampiran 2, diberikan informasi tiga kegiatan utama untuk wajar dikdas sembilan tahun, yaitu peningkatan mutu dan rehab bangunan sekolah, penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs serta operasional TK, SLB, SKB dan SMP. Total dana yang dianggarkan tergolong cukup besar dari total dana yang dikelola Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, yaitu sebesar Rp.23.337.979.212 dari total dana sebesar Rp.30.455.717.287. Berhubungan dengan jumlah dana yang dialokasikan memberikan indikasi bahwa Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat sangat memperhatikan perbaikan pada pendidikan dasar.

Berdasarkan tiga kegiatan pokok tersebut pada dasarnya tidak akan dapat memberikan perubahan tingkat partisipasi sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak melanjutkan sekolah. Permasalahan tersebut bukan diakibatkan oleh kondisi sekolah yang tidak sehat, kurangnya sekolah atau sejenisnya, tetapi lebih pada kesadaran mengenai pentingnya pendidikan.

Pada tahun 2009 dapat dinyatakan alokasi dana, dilihat dari nilai nominal tergolong sangat baik, tetapi pemilihan kegiatan atau program kerja perlu menjadi perhatian. Faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaktuntasan wajar dikdas sembilan tahun, bukan akibat bangunan fisik dari proses pembelajaran. Pada tahun 2010 dan 2011 telah dilakukan pergerakan program wajar dikdas dibagi dalam beberapa kelompok besar, yaitu :

1. Pemerataan dan akses pendidikan
2. Efektivitas dan efisiensi pembelajaran
3. Peningkatan mutu dan elevansi
4. Tata kelola (manajemen)

Kebijakan kerja yang berhubungan dengan peningkatan peserta didik dalam setiap rombongan belajar, mengurangi putus sekolah dan meningkatkan jumlah siswa melanjutkan sekolah dari jenjang sekolah dasar ke jenjang SMP pada dasarnya hanya berhubungan dengan pemerataan dan akses pendidikan. Adapun kebijakan kedua sampai keempat diatas berhubungan dengan kualitas pembelajaran dan pengelolaan lembaga. Terjadinya putus sekolah bukan sebagai akibat dari para orang tua memberikan penilaian bahwa sekolah yang ada tidak berkualitas dan sejenisnya, seluruhnya berasal dari permasalahan internal keluarga yang bersangkutan.

Salah satu kegiatan yang dipilih pada program pemerataan dan akses pendidikan adalah melakukan sosialisasi wajar dikdas sembilan tahun. Pada kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.160.000.000 untuk kerja lima tahun. Pemilihan media dan teknik dalam melakukan sosialisasi penting untuk dipikirkan, sehingga dapat menyentuh sumber masalah. Sosialisasi melalui radio, televisi dan sejenisnya dipastikan tidak akan berhasil, karena keluarga miskin relatif tidak mempunyai media tersebut. Kegiatan turun ke lapangan menjadi solusi atau penggunaan kader tertentu yang selalu berhubungan dengan masyarakat, misalnya posyandu. Para kader adalah ibu-ibu pada setiap desa, lebih mengenal setiap penduduk, termasuk pada keluarga miskin yang mengalami putus sekolah atau memperkuat perilaku keluarga terkait untuk tetap memberikan pendidikan bagi putra-putrinya.

Kegiatan lain yang ada pada kebijakan pemerataan dan akses pendidikan tersebut pada dasarnya kegiatan yang telah bersifat terus menerus, seperti rehab sekolah dan sejenisnya. Kegiatan ini sifatnya hanya memperkuat posisi lembaga pendidikan dasar dalam menampung rombongan belajar, tetapi sebenarnya bukan hal tersebut yang menjadi permasalahan. Kekurangan ruangan dapat diatasi dengan cara mengadakan kelas pagi dan siang.

Uraian dan pembahasan tersebut lebih mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumentasi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Apabila dihubungkan dengan permasalahan banyaknya anak didik yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, maka permasalahannya bukan berada pada efisiensi dan efektivitas sekolah, peningkatan mutu dan tata kelola. Pembangunan unit sekolah baru dapat diterima, termasuk satu atap SD dan SMP. Hal ini jika telah diidentifikasi

faktor penyebabnya, yaitu sekolah menengah mempunyai posisi yang jauh dari masyarakat.

Alokasi dana yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya sangat tergantung pada pemikiran dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, karena pada dasarnya persetujuan alokasi tersebut atas dasar persetujuan anggota dewan juga. Berhubungan dengan hal ini dilakukan wawancara dengan Ketua Komisi 4 yang membawahi sektor pendidikan (wawancara dilakukan pada tanggal 14 Mei 2012, beliau dari Partai Demokrat), berikut hasil wawancaranya :

Peran saya sebagai anggota dewan hanya menyetujui atau tidak atas dasar alokasi belanja....tepat atau tidak yang dibelanjai....selanjutnya mengawasi penggunaannya serta melakukan kajian juga atas kondisi pendidikan di Lobar sebagai dasar memberikan masukan bagi mereka.....

Saya berpikir dilihat dari total dana yang dikelola khususnya tahun terakhir 2010-2011 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi lain, kecuali sektor kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan dan lembaga di bawahnya....

....masalah alokasi menurut saya sudah tepat, begitu juga dengan aspek yang dibiayai....perlu riset,...termasuk seperti ini untuk membantu memecahkan masalah pendidikan di daerah.....hemat saya juga masalah pendidikan bukan hanya alokasi dana dari pemerintah, tetapi akar permasalahan juga ada di masyarakat....kemiskinan, manfaat pendidikan dan lainnya....

Informasi yang diperoleh dari ketua komisi tersebut tidak terlalu bersifat mendasar, beliau menyatakan hanya pada masalah umum saja. Penggalan informasi dari anggota dewan di Komisi 4 diupayakan untuk dilakukan, terakhir pada tanggal 15 Mei 2012, baru ada kesempatan dengan DPRD komisi 4 yang berasal dari PAN, berikut hasil wawancaranya :

Satu permasalahan...ada masalah lain...mau fokus pada usaha mendapatkan keluaran pendidikan yang cepat kerja, fokus sama STM atau sejenis...ini pun masih dalam usaha keras, walaupun terlihat ke

arah sana....satu sisi pada wajar dikdas sembilan tahun....menurut saya hanya untuk melek huruf...tidak memberikan solusi untuk kesempatan kerja, kemampuan berpikir dan lainnya....masalah dasar saja kita belum tuntas, bagaimana pada pendidikan untuk terapan supaya dapat cepat kerja...terbelakang terus....mana yang kita prioritaskan, karena dana terbatas....akhirnya berjalan seperti ini, setengah-setengah.....seluruhnya belum tuntas.

Hasil wawancara tersebut sekilas memberikan informasi mengenai banyaknya masalah di sektor pendidikan, seluruhnya membutuhkan perhatian dan alokasi dana. Pada sisi lain dana terbatas, sehingga alokasi dana tidak bersifat final dalam menyelesaikan masalah. Wawancara dengan anggota Dewan lain tidak dapat dilakukan, karena kesulitan melakukan kontak akibat kesibukan kerja.

Kabid Pemuda, Olahraga dan Seni Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat (wawancara tanggal 16 Januari 2012) memberikan pernyataan :

Dalam karier saya di Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, saya pernah berada pada bagian dikdas serta pernah melakukan riset atau setidaknya sekedar turun lapangan. Apabila saya hubungkan dengan kondisi “anak melintasi jembatan rusak seperti di Jawa”, menapak bukit seperti sekolah di perbatasan; saya merasa tidak seperti itu kondisi atau medan para siswa dalam menumpuh pendidikan dasar di Kabupaten Lombok Barat. Masih sangat jauh lebih enak...., kondisi yang berat medannya hanya di Kecamatan Sekotong, lainnya sudah dapat dianggap tanah datar dan tidak ada sekolah yang terlalu jauh, sehingga jalan merayap dan sedih....

Akar permasalahan bukan berada di situ, walaupun tetap dibutuhkan pembangunan gedung sekolah, perbaikan kondisi guru, terutama guru honor...tapi tentu tidak akan bagus mendirikan sekolah SD dan SMP di suatu kampung yang hanya jumlah KK-nya beberapa puluh saja.

Saya berpikir pada kepercayaan masyarakat atas perubahan nasib melalui pendidikan itu yang utama... Saat sekarang perlu ada jaminan begitu sarjana ada perubahan nasib, atau tamat SMA ada perubahan hidup.

Saya pernah bertanya pada keluarga yang anak-anaknya hanya tamat SD....yang bersangkutan berkata mau tamat SMP juga akan jadi tukang bata, kenapa harus tamat sekolah kalau begitu, mulai saja dari kecil bekerja supaya lebih bisa dalam pekerjaannya.

Perilaku menjadi yang utama dan bagaimana negara mempersiapkan lapangan pekerjaan... apabila dihubungkan dengan pendidikan sebagai lahan penciptaan lapangan pekerjaan, maka jelas ada perubahan dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan.....selama ini belum. Membuka pekerjaan atau dapat bekerja merupakan output dari SMK, bahkan bukan SMA.

Pernyataan yang diberikan oleh informan tersebut perlu disimpulkan dan dianalisis kembali dalam hubungannya dengan kesesuaian program dan alokasi anggaran dalam menuntaskan masalah wajar dikdas sembilan tahun. Dapat disimpulkan untuk mengatasi masalah ini lebih pada perubahan perilaku masyarakat atas pendidikan dan peran dari pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pendidikan yang ditempuh masyarakat mempunyai makna atas perubahan hidupnya. Apabila kondisi ini terjadi, dipastikan orang tua akan berupaya memberikan pendidikan pada anaknya.

Perilaku masyarakat hanya dapat diubah melalui kegiatan sosialisasi atau pendekatan tertentu, tetapi lebih efektif dengan memberikan pembuktian peran pendidikan dalam merubah hidup. Sistem pendidikan dan orientasi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu mengalami perbaikan, penggalakan SMK atau sejenisnya menjadi perhatian. Pada kondisi ini, diberikan bukti pada masyarakat bahwa pendidikan tersebut dapat memberikan akses pada para putra putri untuk dapat menciptakan pekerjaan dan dapat dengan mudah terserap di lapangan pekerjaan.

Pembuktian tersebut perlu menjadi perhatian. Penelitian yang dilakukan oleh Assubki (2011) memberikan pembuktian bahwa peningkatan jumlah SMK menjadi alternatif kebijakan yang tepat dalam dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Barat.

Pada kondisi ini, jika putra-putri telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs, maka akan ada dorongan untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang tersebut. Dapatkah sekedar pemikiran, untuk memberikan pendidikan sejenis SMK mulai pada taraf SMP/MTs, sehingga anak didik telah mempunyai keterampilan dasar pada taraf pendidikan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi keluarga.

Ada pemikiran cerdas dari sumber informan lainnya, yaitu Kasubid Seni (wawancara tanggal 18 Januari 2012), berikut pernyataannya :

Selama ini dalam mengatasi masalah kita selalu terkukung pada pemecahan masalah secara rutinitas dan selalu berpikir lurus....perlu juga pemikiran yang inovatif dan tidak selalu memecahkan masalah dengan melihat masalah tersebut sebagai masalah berdiri sendiri.

Saya pernah berada pada bidang pendidikan non formal dengan kegiatan memberikan pelatihan dan keterampilan.

Berikan keterampilan pada para pemuda atau pada orang tua dengan pekerjaan tertentu...perkenalkan cara kerja baru yang memberikan keuntungan. Setelah yang bersangkutan mendapatkan keuntungan pada pelatihan tersebut, baru ditegaskan itu perannya pendidikan.

Misalnya ...saya pernah memberikan pelatihan budidaya melon pada lahan kosong yang selama itu tidak dimanfaatkan. Hasilnya cukup bagus dari segi pendapatan...pemilik lahan menyatakan kenapa saya tidak gunakan dari dulu...saya jawab "itu perlunya sekolah, saya sendiri mendapatkan pelatihan dari orang yang pendidikannya pertanian." Pada saat itu, perbincangan berlanjut, bahkan lebih fokus pada sekolah yang bisa bertani dengan baik.

Kondisi tersebut telah menciptakan suatu nilai, bahwa sekolah atau perolehan pendidikan yang tinggi, tetapi sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan akan dapat memberikan peluang dalam melakukan perubahan, sehingga pendidikan mempunyai manfaat aktual di masyarakat. Pada kondisi ini dipastikan para orang tua akan berupaya memberikan pendidikan pada putra putrinya. Logika berpikir yang dapat diberikan adalah tidak mungkin para orang tua mempunyai keinginan

kehidupan anaknya akan lebih sulit dari kehidupannya. Alternatif keputusan yang diambil dengan memberhentikan sekolah anaknya dianggap sebagai keputusan yang terbaik.

Kasi Olahraga Bidang POS Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat

(wawancara pada tanggal 20 Januari 2012), menyatakan :

Mohon maaf...saya mempunyai pemikiran atau setidaknya selalu berpikir, kita sering merubah visi, misi, bahkan ganti gubernur dengan visi yang baru sekalipun, tetapi kerja yang kita jalankan saya pikir tidak berbeda....

Kegiatan yang ada, semula suatu badan berdiri sendiri atau berada dalam wadah tertentu mengalami perubahan, tetapi kerjanya tetap saja. Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dari dulu sampai sekarang, kerjanya mengalokasikan dana untuk perbaikan, pembangunan sekolah, kami mempersiapkan anak untuk kegiatan olahraga, mengikuti dan mengadakan perlombaan.

Begitu ada wajar dikdas sembilan tahun...memang sudah ada bagian pendidikan dasar.

Permasalahan yang kita hadapi dalam semua sektor memerlukan perubahan... guru mengajar pagi pulang siang, begitu juga dengan murid. Kita kalang kabut begitu ada UAN yang distandar sama pusat, seolah lupa sama anak yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolah....

Saya mempunyai keyakinan, bahwa pendidikan yang sukses bukan hanya berimplikasi pada pendidikan, tetapi juga sektor lain, kesehatan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, keamanan sosial dan lainnya. Maka dapat saya katakan, begitu pendidikan ini punya permasalahan, maka pada dasarnya adalah implikasi dari aspek lain juga.

Koordinasi antar lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah wajar dikdas sembilan tahun sangat diperlukan. Depnaker masih mengirim berpendidikan SD, bahkan tidak tamat SD, bagaimana mungkin akan tuntas wajar dikdas sembilan tahun. Akan berbeda, jika syarat minimal berpendidikan SMP.

Sub kajian ini melakukan analisis atas alokasi dana yang diperuntukkan untuk setiap program, secara khusus untuk program pengentasan wajar dikdas sembilan tahun. Fakta dari dokumentasi yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat bahwa kegiatan yang sifatnya oriented adalah pemberian sosialisasi,

membayar gedung sekolah agar pemerataan dan akses pendidikan dapat diperoleh masyarakat.

Berhubungan dengan hal tersebut ada informasi yang diperoleh bahwa perjuangan untuk mendapatkan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat pada tingkat SD dan SMP tidak separah kondisi di luar, masih relatif mudah jangkauan, kecuali pada daerah di Kecamatan Sekotong yang topografinya berbukit. Informasi lain yang diperoleh juga memberikan keyakinan bahwa implikasi pendidikan bukan sebatas dunia pendidikan, tetapi juga seketor lain, maka diyakini bahwa permasalahan yang ada sektor pendidikan juga bukan sebatas akibat dari pendidikan itu sendiri, tetapi diperlukan koordinasi dengan organisasi publik lainnya.

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat (tanggal 20 Januari 2012). Pada wawancara tersebut diberikan informasi untuk mendapatkan waktu kepala untuk melakukan fokus group discusion (FGD), disepakati untuk dilakukan pada tanggal 26 Januari 2012. Berhubungan dengan alokasi dana untuk program pengentasan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat, berikut pernyataannya :

Apa yang kami lakukan pada dasarnya telah menjadi dokumentasi, bapak dapat dilihat pada setiap laporan, bahkan rincian dananya (pengeluarannya) dapat anda lihat di APBD. Evaluasi setiap program selalu dijalankan, bahkan pada penggunaan dana. Adapun alokasi dana biaya pembangunan atau biaya langsung yang dikelola oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat sebagian besar untuk menuntaskan masalah wajar dikdas sembilan tahun. Menurut saya, alokasi dana yang sebagian besar untuk wajar dikdas sembilan tahun tergolong tepat, tetapi kami juga mempunyai pemikiran bahwa program yang dijalankan perlu perbaikan di masa yang akan datang.

Alokasi dana secara nominal dapat dinyatakan bahwa sebagian besar dana untuk menuntaskan masalah wajar dikdas sembilan tahun sangat disetujui, tetapi yang menjadi kajian lebih lanjut adalah pemilihan program yang dibiayai. Memperbanyak gedung sekolah, perbaikan sekolah dan lainnya dipastikan benar, karena konsepnya untuk pemerataan dan akses pendidikan. Hal yang menjadi masalah adalah angka putus sekolah pada pendidikan SD dan SMP masih terjadi dengan jumlah yang cukup besar. Kejadian ini perlu program khusus, karena dipastikan permasalahan bukan akibat gedung sekolah yang tidak nyaman ataupun program lain untuk meningkatkan tata kelola internal sekolah dan peningkatan mutu pendidikan, tetapi permasalahan pada perilaku keluarga.

E. Faktor Penghambat dan Pendorong pada Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Kabupaten Lombok Barat

Focus group discussion (FGD) mengenai faktor penghambat dan pendorong penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat dilakukan di ruang kerja kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Dilakukan sesuai rencana pada tanggal 26 Januari 2009, di mulai pukul 10.00 sampai pukul 13.00

Adanya banyak kegiatan personal Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, tidak dapat dikumpulkan seluruh pejabat ada, tetapi setidaknya ada pejabat yang membidangi wajar dikdas sembilan tahun, kepala dan bidang lainnya sebagai suatu kerja untuk *cross check* informasi. Diskusi berjalan dengan baik, di awal pembicaraan ditegaskan oleh kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat bahwa kerja ini sering dilakukan apabila ada permasalahan yang perlu dipecahkan bersama. Artinya

kerja FGD bukan hal yang baru dalam lingkungan kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

Di tegaskan bahwa program kerja yang kami jalankan pada dasarnya adalah hasil kerja ini, walaupun dilakukan dalam biadnag masing-masing, supaya lebih oriented, karena personal terkait yang lebih mengerti bidang yang dikerjakan. Kabid Dikdas menyatakan bahwa :

Empat kebijakan yang diambil pada dasarnya untuk mengatasi masalah putus sekolah dan lainnya yang menyebabkan angka partisipasi sekolah rendah, tetapi kita tidak bisa menggunakan seluruh dana yang ada untuk pekerjaan itu. Proses pembelajaran yang sedang berlangsung harus berjalan dengan baik, efisiensi dan efektivitas, relevansi dengan daya saing serta tata kelola sekolah, bukankah potensi yang telah ada harus dioptimalkan.

Apa saya mau katakan pada kita semua...ini yang dikenal dengan optimalisasi dari pengelolaan dana yang terbatas. Apabila dana tidak terbatas, mari kita kasih uang transport untuk anak miskin, uang buku, uang seragam atau uang ganti pendapatan anak jika disuruh bekerja oleh orang tuanya.....pertanyaannya adalah sebegitu manjakah masyarakat kita kelola...peran pemerintah adalah menyediakan fasilitas, mari mereka gunakan dengan maksimal, jangan kita terbawa dengan masalah klasik kemudian kita menyalahkan pemerintah...anda lihat bagaimana kesejahteraan guru ditingkatkan, seharusnya mereka bersyukur dalam bentuk kerja yang maksimal. Jangan hanya menjalankan tugas di sekolah, di masyakat juga dengan cara mencari apa yang menyebabkan anak putus sekolah, bahkan menurunnya prestasi siswa sekalian....jangan sudah gaji naik, minta lagi yang lain, itu namanya hawa nafsu...bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi maaf pemenuhan hawa nafsu...itu yang terjadi sekarang...berbeda dengan guru dulu, zaman kita sekolah mereka disegani oleh masyarakat, karena kepeduliannya....

Tapi ingat...jangan masyarakat disuapi, mereka akan malas juga. Tugas pemerintah, melalui kerja kita adalah memberikan media.

Uraian tersebut mengawali pertemuan FGD yang disampaikan, memberikan pemikiran yang cemerlang dan sejenak semua berpikir, termasuk peneliti. Kesmpatan tersebut digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi, sekaligus memunculkan

cross check informasi, bagaimana dengan penyuluhan atau sosialisasi wajar dikdas sembilan tahun yang dijalankan selama periode 2011-2012.

Merubah sikap, perilaku bukan kerja yang sederhana....penyuluh pertanian saja perlu kerja keras untuk merubah sistem bertani tradisional masyarakat. Penyuluh KB bekerja keras, begitu mereka sadar, maka obat KB dan lainnya mereka berani beli.... terlebih pendidikan. Bagaimana dengan pendidikan, ya ada yang sadar dan ada yang tidak sadar, sama dengan KB masih banyak yang punya banyak anak, hidup miskin, termasuk tidak sekolah.

Kesadaran atas perlunya pendidikan perlu diubah, karena mereka belum merasakan nikmatnya orang mempunyai pendidikan yang digunakan untuk kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan lainnya.

Kerja keras semua pihak diperlukan....bukan hanya dari Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam menciptakan wajar dikdas sembilan tahun. Setiap personal yang berhubungan dengan masyarakat perlu menyampaikannya, termasuk juga menggunakan potensi tokoh agama dan masyarakat.

Diskusi berlanjut untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan yang menyebabkan belum tuntasnya wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat . Simpulan dari FGD atas faktor pendorong berupa :

1. Komitmen bersama
2. Kebijakan atau perundangan
3. Otonomi pengelolaan dana
4. Terapan manajemen organisasi

Adapun faktor penghambatnya berupa :

1. Perilaku masyarakat
2. Kemiskinan
3. Topografi
4. Implikasi pendidikan wajar dikdas sembilan tahun

Berdasarkan faktor pendorong dan faktor penghambat penuntasan wajar dikdas sembilan tahun, maka dapat dilakukan kajian untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada usia tersebut atau menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka out sekolah dasar dalam melanjutkan pendidikan. Komitmen bersama menjadi faktor pendorong yang paling penting, baik diinternal Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat ataupun pada dinas lain, tinggal bagaimana pihak pemerintah daerah memberikan langkah-langkah dalam melakukan koordinasi. Hal ini terjadi pada upaya untuk mensosialisasikan keluarga berencana pada era orde baru, seluruh organisasi publik dan potensi masyarakat dikerahkan, bahkan mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata (KKN) juga mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi keluarga berencana.

Semua lapisan masyarakat, terlebih aparaturnegara pada lintas departemen menyadari dengan sangat pentingnya peranan pendidikan. Setiap tufoksi organisasi publik yang bersentuhan dengan masyarakat akan semakin mudah menjalankan pekerjaannya apabila berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi.

Cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, terlebih Bupati Kabupaten Lombok Barat berlatar belakang pendidikan akan dapat memformulasikan kontribusi setiap dinas dan badan atau lembaga yang ada di bawah koordinasinya atas penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat. Pusat koordinasi diberikan pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya peran dari organisasi tersebut untuk melakukan formulasi penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat. Tenaga sosialisasi bukan hanya bersumber dari Dinas Dikpora

Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga secara tidak langsung atas kerja yang dijalankan oleh aparatur lain yang bersentuhan dengan masyarakat, terutama pada daerah yang menjadi sentra terjadinya putus sekolah.

Dinas peternakan, misalnya melalui bantuan atau program peternakan yang dijalankan juga menyisipkan perlunya para orang tua menyiapkan generasi yang berpendidikan tinggi. Kerja kementerian agama tidak hanya fokus pada masalah keagamaan, seperti haji dan sejenisnya, tetapi juga bagaimana menyukseskan pendidikan, tentu melalui media yang menjadi tugasnya. Pondok pesantren, di samping mengadakan pembelajaran agama juga diharapkan menjalankan pendidikan dengan kurikulum tertentu yang menghasilkan santri melek huruf, melek hitung, melek teknologi dan melek keterampilan kerja.

Kerja semua organisasi publik, tentu tanpa ada pertanggungjawaban kerja, tetapi hanya sebatas komitmen bersama untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini ditegaskan untuk menghindari kompleksnya pelaporan dan sejenisnya yang terkesan menyebabkan tumpang tindihnya tugas pokok.

Pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah telah menjadikan wajar dikdas sembilan tahun sebagai bagian kerja yang harus disukseskan. Adanya hal ini menjadi dukungan dalam mempercepat tuntasnya wajar dikdas sembilan tahun, terlebih adanya hak otonomi dalam pemilihan program dan pengelolaan dana. Hal penting yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat adalah pemilihan program yang oriented.

Setiap program pemerintah, umumnya terhalang akibat dari perilaku masyarakat yang tidak memberikan dukungan. Pada era global, yang dicirikan dengan

proses pembelajaran yang tidak mengenal batas waktu dan tempat agak., maka agak membingungkan jika ada keluarga yang masih tidak mengerti arti penting pendidikan.

Kondisi tersebut pada dasarnya sebagai akumulasi dari faktor lain, dapat saja terjadi akibat dari kemiskinan yang menyebabkan keluarga tersebut membiarkan pikirannya atas pendidikan keluarganya. Kerja keras dan perjuangan dalam hidup yang melemahkan pikiran positifnya atas manfaat pendidikan. Fakta dalam kehidupan sehari-hari yang dijalankan, bahwa orang sukses, baik untuk kehidupan ekonomi dan sosial dipastikan berasal individu yang mempunyai pendidikan tinggi atau setidaknya tuntas dari wajar dikdas sembilan tahun.

Hal penting lain yang perlu diupayakan oleh pemerintah adalah bagaimana mengerakkan perekonomian nasional ataupun pada tingkat regional yang diindikasikan dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang luas. Pekerjaan yang luas dengan perolehan pada tingkat pendidikan tertentu akan menjadi faktor yang memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang disyaratkan.

Faktor hambatan ini yang perlu dituntaskan dengan skala prioritas, karena dengan adanya implikasi positif secara nyata dari pendidikan akan dapat merubah perilaku masyarakat atas pendidikan. Kondisi yang akan sangat berlawanan terjadi, jika banyak sarjana yang susah mencari pekerjaan. Apabila kondisi ini terjadi, maka dipastikan persepsi masyarakat atas pendidikan akan mengalami penurunan, karena percuma mendapatkan pendidikan dengan pengorbanan dan perjuangan tinggi, tetapi akhirnya tidak terserap di lapangan pekerjaan.

Konteks ini bersesuaian dengan informasi yang diperoleh dari informan mengenai program yang perlu dijalankan oleh pemerintah. Program yang dijalankan harus tidak bersifat lurus, tetapi perlu dicarikan solusi dari sektor lain. Diharapkan terjadi suatu kondisi kemudahan masyarakat berpendidikan dalam mendapatkan pekerjaan atau dukungan penciptaan lapangan pekerjaan serta jelas pembedanya dengan kondisi individu yang tidak berpendidikan.

Hasil kajian ini relevan dengan temuan Hanye, dkk (2010) bahwa partisipasi masyarakat atas pendidikan bukan hanya berhubungan dengan aspek pendidikan, seperti kualitas pendidikan, ketersediaan guru dan lainnya, tetapi sebagai implikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat atas penuntasan wajar sembilan tahun tidak akan dapat terjadi, jika kondisi ekonomi masih berada pada pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja tidak ada. Hal yang menjadi permasalahan justru kesempatan kerja yang bersesuaian dengan pendidikan dan keterampilan rendah masyarakat Indonesia justru banyak di Malaysia, sehingga banyak anak usia sekolah juga terlibat menjadi TKI dan TKW.

Otonomi daerah belum berhasil dijalankan, pembangunan belum berjalan dan baik serta belum menyentuh akar permasalahan yang ada. Peran pemerintah daerah sebagai pengambil wewenang penuh dalam pengelolaan daerahnya tidak diikuti dengan kondisi yang otonom dalam keuangan, sehingga masih sangat tergantung pada alokasi dari APBN. Optimalisasi realisasi strategi sangat tergantung pada ketersediaan dana serta alternatif yang lebih didahulukan. Pembangunan yang dijalankan hendaknya dapat bersifat memecahkan satu masalah dengan mengubah atau menggerakkan permasalahan lain, sehingga terjadi manfaat yang berkelanjutan

(Nasirin dan Leonardo, 2010). Pembangunan tidak hanya melakukan perubahan atas suatu obyek, tetapi juga dapat meningkatkan kondisi sosial dan tradisi yang ada dalam masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.

E. Interpretasi

Program yang dijalankan untuk menuntaskan wajar dikdas sembilan tahun oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009 relatif bersifat tidak fokus, karena hanya berorientasi pada perbaikan bangunan, pengembangan sekolah dan operasional pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan pendidikan pra sekolah/PAUD, TK). Ditegaskan bukan sebagai program yang bersifat *oriented* pada tahun 2009, karena dipastikan bukan kualitas bangunan dan kualitas pendidikan serta biaya operasional sekolah yang menjadi penyebab tingginya anak putus sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD-SMP).

Program tersebut dapat dinyatakan hanya bersifat rutinitas dari periode sebelumnya. Diperlukan program khusus untuk menangani permasalahan yang belum dapat dituntas pada kurun waktu yang panjang. Dalam Five C's strategy ditegaskan adanya kejelasan strategi dihubungkan dengan tujuan yang ditetapkan, baik tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Permasalahan yang mendasar dalam pendidikan di Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya berdampak pada kondisi sosial ekonomi adalah belum tuntasnya pendidikan dasar. Apabila kondisi ini masih terjadi, maka dipastikan akan menjadi hambatan dalam pembangunan periode yang akan datang, terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Keselarasan antara permasalahan dan perencanaan startegis selanjutnya dengan implementasi sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan mendasar di Kabupaten Lombok Barat. Mengacu pada penelitian Suyuti (2010) bahwa bias yang terjadi antara rencana dan realisasi juga terjadi di daerah lain, sehingga realisasi dana yang tertuang dalam APBD tidak sesuai dengan seluruh rencana yang dituangkan dalam KUA.

Pada tahun 2010-2011 program kerja yang dicanangkan adalah pemerataan dan akses pendidikan serta perhatian terhadap pembentukan kualitas pendidikan, efisiensi, relevansi dengan daya saing dan tata kelola sekolah. Permasalahan wajar dikdas sembilan tahun hanya relevan dengan program pertama, yaitu memperluas unit bangunan sekolah, pembentukan satu atap SD dan SMP; MI dan MTs. Program yang relatif berbeda dibandingkan dengan program periode sebelumnya adalah adanya dana untuk sosialisasi wajar dikdas sembilan tahun.

Mengacu pada rencana kerja yang dijalankan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada periode 2010-2011 dapat dipastikan tidak terjadi perubahan yang mendasar atas tuntasnya wajar 9 tahun. Kondisi faktual yang dapat terjadi adalah kompleksitas masalah sosial serta rendahnya apresiasi terhadap pendidikan dapat menjadi pemicu drop out di tingkat SD dan SLTP. Hasil riset Koyan (1998) juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat, bahwa banyak orang tua yang tidak termotivasi untuk berkorban guna pendidikan anaknya, karena rendahnya pengharapan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial melalui pendidikan.

Fakya yang ada, seluruh personal Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat masih memberikan penilaian umum, bahkan kepala menyatakan bahwa masalah wajar

dikdas sembilan tahun belum tuntas di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini yang menyebabkan penelitian ini dilanjutkan pada kajian temuan faktor pendorong dan penghambat atas tuntasnya wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat.

Analisis atas faktor pendorong berupa komitmen bersama, perundangan, alokasi dana dan manajemen serta faktor penghambat berupa perilaku, kemiskinan, topografi dan implikasi pendidikan. Saran penting yang dapat diberikan perhatian adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan atau hasil dari kebijakan agar pendidikan mempunyai implikasi nyata pada masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dapat mudah dalam mencari pekerjaan atau mudah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Kondisi yang terjadi antara warga berpendidikan tinggi dan rendah harus jelas dalam masyarakat.

Pemerintah harus menciptakan kondisi ekonomi yang dicirikan dengan kesempatan kerja yang luas, dengan syarat pendidikan minimal tertentu. Apabila kondisi ini terjadi, maka secara sadar atau tidak sadar akan menyebabkan seluruh pihak, termasuk keluarga miskin akan berjuang memberikan pendidikan yang tinggi pada putra-puternya, terlebih wajar dikdas sembilan tahun bersifat gratis.

Berbagai kondisi tersebut akan semakin mensukseskan pendidikan dasar, jika setiap organisasi publik mengimplementasikan komitmennya atas pendidikan dasar. Apa yang dijalankan oleh pemerintah pada era orde baru, jika menjalankan suatu program yang sifatnya esensial, maka penggunaan seluruh potensi organisasi publik menjadi pilihan. Semua organisasi publik (dinas, badan dan lembaga), bahkan menggunakan potensi yang ada di masyarakat untuk mewujudkannya. Konteks ini memberikan hasil, terutama pada implementasi keluarga berencana, bahkan pada

akhirnya masyarakat bersedia untuk melakukan pembayaran. Kondisi ini juga dapat diterapkan pada sektor pendidikan, karena dalam penerapannya juga gratis.

Pemerintah dalam menerapkan pendidikan gratis di tingkat wajar dikdas sembilan tahun harus bersifat nyata. Guru yang melakukan praktek pembayaran tertentu atau menciptakan pembelajaran dengan sistem pembayaran lebih lanjut, baik alasan private, pembelian buku dan sejenisnya harus dihindari, karena pemerintah telah melakukan alokasi anggaran untuk operasional pendidikan dasar. Guru juga perlu menjalankan tugas sosialnya di dalam masyarakat, karena guru adalah personal yang paling awal mengetahui kondisi siswanya, bahkan kecenderungan jika anak didik akan putus sekolah atau tidak melanjutkan pada jenjang lebih tinggi. Kunjungan pada orang tua murid perlu dilakukan oleh para guru, konteks ini sebagai konsekuensi dana profesi yang diterima oleh para guru.

Uraian terakhir tersebut dapat dicanangkan sebagai kerja guru oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dapat saja dilakukan, karena adanya hak otonomi dalam menyusun program kerja dan pengelolaan dana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam era otonomi daerah, Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat sebagai SKPD dapat membuat program kerja yang dipercayai dapat memecahkan permasalahan yang ada. Kerja rutinitas bukan lagi menjadi ciri SKPD (termasuk Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat) dalam mengatasi permasalahan di lingkungan kerja atau faktor yang menjadi tufoksinya.

Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat melalui bidang dikdas dapat menerapkan sanksi bagi guru yang berstatus pegawai negeri (terlebih jika telah mendapatkan sertifikasi) dan kepala sekolah yang mempunyai tingkat *drop out* yang

tinggi. Kebijakan ini perlu diaktualisasikan dalam program nyata, sehingga aparaturnegara yang berada pada tingkat lapisan terbawah yang bersentuhan dengan masyarakat dapat memberikan solusi awal atau melakukan koordinasi dengan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam mengambil tindakan. Konsep kerja ini dengan sistem struktural, guru memberikan pelaporan pada kepala sekolah, selanjutnya kepala sekolah yang memberikan laporan pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Kerja ini dapat juga dijalankan sebagai kerja periodik pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi pada setiap kepala sekolah pada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat perlu memberikan perhatian pada sekolah dasar yang ada di Sekotong. Kerja yang dijalankan adalah pemanggilan kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Sekotong untuk menemukan permasalahan tingginya anak putus sekolah pada sekolah dasar. Pemberian tugas untuk menuntaskan masalah pada dasarnya sebagai bagian kerja dari kepala sekolah, tetapi seluruhnya sebagai konteks menjalankan peran Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Koordinasi kerja, pelaporan dan pengenalan masalah di lapangan perlu dilaporkan pada pembuat kebijakan. Kondisi ini juga terjadi di Kecamatan Lingsar untuk tingkat SMP, perlu juga dikenali kondisi yang terjadi, karena muncul sebagai kecamatan dengan tingkat drop out yang tinggi untuk pendidikan SD.

Dalam era otonomi daerah, dengan terapan manajemen berbasis sekolah pihak sekolah mempunyai hak otonom untuk mengelola dana pendidikan. Hal ini yang mengharuskannya juga bekerja dalam konteks tersebut, bukan sebatas bertanggung jawab untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Peran ini menjadi tanggungjawab

kerja kepala sekolah, di mana pengukuran kinerja sekolah yang berbasis input, proses dan output bukan hanya pada tingkat kelulusan, tetapi juga berlangsungnya proses pendidikan tanpa ada kejadian *drop out* pada murid atau anak didik.

Konteks kerja tersebut perlu juga menjadi salah satu solusi untuk menurunkan angka *drop out*, tetapi dengan tepat melakukan kajian kesesuaian hukum positif yang ada. Hal ini ditegaskan agar daerah otonomi, melalui kerja SKPD tidak melanggar peraturan atau hukum yang berlaku secara nasional. Pada prinsipnya, dalam era otonomi daerah setiap daerah mempunyai permasalahan yang spesifik, sehingga perlu merumuskan kebijakan dan program kerja yang spesifik juga. Konteks ini sebagai ciri dari era otonomi daerah, sehingga setiap daerah lebih oriented dalam mengatasi permasalahan yang ada, termasuk permasalahan belum tuntasnya wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam rangka jelasnya berbagai program kerja yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pemerintah dan rumusan kebijakan umum anggaran oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada periode 2012. Penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat tidak dapat mutlak sebagai tanggung jawab Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, tetapi juga organisasi publik lainnya melalui koordinasi kerja serta peran sekolah melalui kerja guru dan kepala sekolah yang bersentuhan langsung dengan masalah pendidikan.

Pendidikan adalah masalah yang *esensial* dalam pemerintahan. Suksesnya pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sangat tergantung pada kesuksesan pada sektor pendidikan. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan perda agar setiap

dinas dan badan memberikan kontribusi atas suksesnya pendidikan dasar serta memberikan implementasi nyata dari pendidikan di masyarakat.

Dalam penelitian ini, permasalahan klasik tidak dijadikan sebagai permasalahan, karena aspek tersebut tidak membutuhkan solusi yang cerdas. Permasalahan klasik yang dimaksud adalah ketersediaan dana yang terbatas untuk memunculkan program kerja. Konsep optimalisasi dalam pembiayaan program sudah menjadi pengetahuan dan terapan praktek secara umum. Adapun pemerintah melalui kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya telah memberikan bagian yang besar untuk menjalankan program penuntasan masalah wajar dikdas sembilan tahun.

Dalam menyusun rencana strategis, jika dihubungkan dengan Five C's relatif jauh. Realisasi rencana strategis yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, tidak sejalan dengan *core strategy*, *consequences strategy*, *customer strategy*, *control strategy* dan *culture strategy*. Kesesuaian dengan *core strategy* masih jauh, dibuktikan dengan tidak sesuainya permasalahan dasar pendidikan di Kabupaten Lombok Barat dengan strategi yang ditempuh. Strategi yang dijalankan tidak memberikan keberpihakan pada permasalahan wajar 9 tahun.

Pada tingkatan akhir dari lima strategi yang dibangun oleh Osborne dan Plastrik (1997) bahwa rencana strategi dan implementasi harus menyentuh hati dan pemikiran masyarakat atas penuntasan wajar 9 tahun, masih relatif jauh. Implementasi yang relevan hanya sebatas sosialisasi semata. Hal penting yang perlu ditegaskan dari strategi akhir ini, bagaimana memunculkan apresiasi yang tinggi pada masyarakat atas pendidikan. Dalam makna tingkatan pendidikan yang ditempuh

masyarakat mempunyai ekuivalensi dengan penyesuaian taraf hidupnya. Konteks ini juga diajukan oleh Koyan (1998), bahwa apresiasi masyarakat yang rendah atas pendidikan menyebabkan wajar 9 tahun tidak tuntas. Dalam Osborne dan Plastrik (1997) konteks ini dimaknai dengan *touching hearts* dan *winning minds*. Aplikasi nyatanya adalah pendidikan mempunyai ekuivalensi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan kesempatan kerja, membuka lapangan pekerjaan atau aspek lain yang relevan, sehingga taraf hidupnya berubah melalui pendidikan. Satu sisi fenomena yang ada banyak keluaran pendidikan yang masih bergulat dengan pencarian pekerjaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penilaian kualitatif dicirikan dengan pengambilan simpulan secara induktif, tentu atas dasar telaah yang mendalam atas setiap informasi. Simpulan yang diberikan adalah :

1. Kebijakan dan program kerja yang dijalankan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada era otonomi daerah dituangkan dalam KUA, sebagai dasar untuk memperoleh alokasi dana. Pada tahun 2009 kebijakan dan program yang dijalankan tidak bersifat spesifik atau dapat dinyatakan sebagai rutinitas, karena tidak terlihat orientasi untuk menyelesaikan wajar dikdas sembilan tahun. Kebijakan dan program yang dijalankan adalah meningkatkan mutu dan rehab bangunan, pengembangan sekolah (SD/MI, SMP/MTs dan pendidikan pra sekolah) serta biaya operasional.

Kebijakan dan program yang berorientasi penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat pada lingkup kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat terlihat pada tahun 2010 dan 2011, di mana ada program pemerataan dan akses sekolah disamping tiga kebijakan lain yang berorientasi pada proses pembelajaran dan tata kelola sekolah. Program kerja yang sangat berkenaan dengan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun adalah sosialisasi wajar dikdas sembilan tahun.

2. Hasil kerja pada kebijakan dan program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dalam penuntasan wajar dikdas sembilan tahun masih belum optimal. Hal ini dinyatakan oleh seluruh personal Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat, terlebih ada dukungan data tingginya drop out pada tingkat SD dan SMP.

Dilihat dari aspek alokasi dana, Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat telah memberikan perhatian yang tinggi pada penuntasan wajar dikdas sembilan tahun. Hal yang menjadi masalahnya adalah program kerja dan adanya permasalahan yang tidak menjadi kerja Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat memberikan kontribusi atas tingginya angka *drop out*.

3. Faktor pendorong untuk suksesnya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun adalah adanya komitmen bersama, perundangan, otonomi pengelolaan dana dan manajemen. Adapun faktor penghambatnya berupa perilaku, kemiskinan, topografi dan implementasi pendidikan.

B. Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah daerah perlu memberikan arahan kerja, dapat juga dalam peraturan daerah agar dapat memberikan kontribusi pada upaya menyukseskan wajar dikdas sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat. Berhubungan dengan kerja tersebut sebagai sentral koordinasi dijalankan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat. Konteks ini meminjam kebijakan

yang ditempuh pada era orde baru dalam menyukkseskan program yang esensial.

2. Koordinasi kerja di atas dapat juga dituangkan dengan meciptakan kemudahan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dan penciptaan kerja, dengan mengedepankan peran pendidikan untuk mendapatkannya. Kerja ini sebagai wujud untuk meningkatkan implementasi sekolah, sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat agar menempatkan pendidikan sebagai cara untuk melakukan perubahan kehidupan keluarganya.
3. Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat membuatkan kerja baru bagi para kepala sekolah, khususnya SD dan SMP untuk memberikan pelaporan atas kondisi pembelajaran yang dijalankan, terutama kasus putus sekolah.
4. Bagi peneliti lebih lanjut, perlu penelitian atas faktor pendukung dan faktor penghambat dengan merumuskan indikator pada setiap aspek terhadap perilaku masyarakat dalam aspek pendidikan. Penelitian lebih lanjut ini perlu dilakukan dengan desain kuantitatif agar dapat diperoleh parameter yang mempunyai makna nilai general.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asubki, M. Karim, 2011. *Analisis Perbandingan Belanja Dengan Menggunakan Comparative Budget Statement (Cbs) Pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat Ditinjau Dari Pengalokasian Anggaran*, Mataram: Tesis Program Magister Manajemen, Universitas Mataram..
- Bastian, I., 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat.
- Halim Abdul dan Mujib Ibnu, 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hanye, paternus, dkk, 2010, *Akseibilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas dan Sangau Kalimantan Barat*, Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Lubis, S., 2003. *Masalah-masalah Hukum dalam Otonomi Daerah, Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VIII*, Denpasar. Departemen Hukum dan HAM RI.
- Koyan, I.W., dkk., 1998. *Identifikasi dan Pemetaan Peserta Didik Usia wajib Belajar 9 Tahun yang Pulus Sekolah dan yang Tidak Melanjutkan Ke Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) di Kabupaten Buleleng; Suatu Penelitian Kebijakan*. Jurnal Aneka Widya STKIP Singaraja. No. 2 Th. XXX1. 1998.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Panduang Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Yogyakarta:UPP, AMP YPKN..
- Manurung, M., 2004. *Kajian Empiris Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan (Proyek) di Kota Jayapura*. Yogyakarta: Tesis UGM.
- Meydianawathi, L.G., 2010. *Kajian Pendidikan Dasar: Pembangunan Manusia Berkualitas Dalam Millineum Developments Goals (MDGs) 2015*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT.
- Nasirin Chairun, 2010. *Peran Strategis Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Universitas Brawijaya.

- Nisjar, Karhi dan Winardi, 1997. *Manajemen Strategik*, Mandur Maju, Bandung
- Novianti, dkk., 2007. *Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang*. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*, [www.consultci.com/book_reviews/Banishing Bureaucracy.html](http://www.consultci.com/book_reviews/Banishing_Bureaucracy.html), 2012.
- Rangkuti, Freddy, 2001, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Robinson B. Richard dan Pearce A. John, 1997, *Manajemen Strategik; Formulasi, Implementasi dan Pengendalian Jilid I*, Jakarta: Binarupa Aksara
- Said Mas'ud, 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Salam Setyawan Dharma, 2001. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Djambatan.
- Safi'i, M., 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Seymour Ricard dan Turner Sarah, S., 2002. *Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment*". *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December 2002): 33-51.
- Siregar, Imran, (2010), *Studi Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Studi Kasus Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandar dan Madrasah Ibtidaiyah PUI Cendono Kandat Kediri-Jawa Timur*, Jakarta: Puslit Pendidikan Agama.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardi, 2003. *Tinjauan Komparasi Uu No. 5 Tahun 1974 Terhadap Uu No. 22 Tahun 1999 Dalam Hal Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Lombok Barat*, Skripsi, Mataram: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Suyuti, M., 2010. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mataram; Suatu Studi Dari Perspektif Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Tesis. Magister Manajemen. Pascasarjana Universitas Mataram. Mataram.

Syakrani dan Syahriani, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Umar, Husein, 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Wali Press.

Wasistiono Sadu, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta: CV. Fokus Media.

B. Dokumen

_____, PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta.

_____, PP No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan. Jakarta.

_____, (2006), UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Otonomi Daerah, Bandung:Fokusmedia.

_____, (2006), Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006, Bandung:Fokusmedia.

BPS NTB, 2009. *NTB dalam Angka*. Mataram.

Kuesioner :**PERAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PENUNTASAN
WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI ERA OTONOMI DAERAH**

Dengan hormat;

Strategi sektor pendidikan yang mengarah pada pencapaian tinggi hanya dapat terwujud jika permasalahan dasarnya telah dapat diatasi. Adanya fakta pendidikan wajar sembilan tahun di Kabupaten Lombok Barat belum tuntas, maka perhatian diberikan upaya yang diterapkan oleh dinas terkait pada kebijakan program wajar sembilan tahun tersebut.

Kajian dilakukan pada seluruh aspek yang menjadi wewenang pengelolaan Dinas Dikpora Kabupaten Lobar, mulai dari perumusan strategi, kebijakan dan program kerja yang terurai dalam Kebijakan Umum Anggaran serta pengelolaan keuangan yang diarahkan untuk wajar sembilan tahun. Temuan akan lebih jelas dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mengentaskan masalah wajar sembilan tahun, selanjutnya dijadikan formulasi untuk memberikan usulan kebijakan pada periode yang akan datang.

Berhubungan dengan hal di atas, mohon kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Semoga bantuan yang diberikan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Hormat Peneliti

A. Dasar Dalam Mengumpulkan Data

1. Apa visi Dinas Dikpora Lobar pada tahun 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 :

.....
.....
.....

..... kenapa konstan

kenapa berubah :

.....
.....
.....

2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang diajukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lobar pada lima tahun anggaran terakhir; tahun 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

.....data berupa KUA (data sekunder)

3. Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat pada tahun terakhir, termasuk pada lima tahun kerja yang akan data (2009-2014).

.....data sekunder

4. Anggaran belanja yang dikelola Dinas Dikpora Lobar pada tahun terakhir 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007

.....data sekunder

5. Secara spesifik dari tiga informasi di atas akan diberikan perhatian pada perhatian Dinas Dikpora Kabupaten Lobar untuk wajar sembilan tahun.....

.....
.....
.....

..... disediakan lembar pencatatan, karena informasi ini dapat bersumber dari banyak pihak di instansi terkait.

6. Bagaimana fakta pelaksanaan dari kebijakan dan program kerja yang dijalankan di atas, secara khusus pada wajar sembilan tahun

.....
.....

..... (mengacu pada realisasi, bukan rencana atau anggaran)

7. Apabila dilakukan pemetaan, pada wilayah mana yang masih belum tuntas wajar sembilan tahunnya :

.....
.....
.....

8. Apa bentuk perhatian yang diberikan oleh Dinas Dikpora Lobar :

.....
.....
.....

9. Spesifik masalah pada wajar sembilan tahun :

Jumlah sekolah :

Jumlah rombongan belajar :

Jumlah guru :

Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat :

.....
.....

10. Apa program kerja yang dijalankan Dinas Dikpora Lobar :

.....
.....
.....

11. Diberikan pertanyaan pada setiap kepala bagian di Dinas Dikporan Lobar :

Berikan empat faktor pendorong sesuai intensitasnya :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....

Berikan empat faktor penghambat sesuai intensitasnya :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....

12. Menurut bapak bagaimana kondisi wajar sembilan tahun saat ini (tahun 2011)

:
.....
.....

13. Sesudah sesuai rencana atau tidak

.....
.....
.....

14. Apakah kondisi tersebut sebagai hambatan untuk menjalankan program kerja yang lainnya :

.....
.....

15. Apa capaian secara regional dan nasional pada pendidikan wajar sembilan

tahun di Lobar :

.....

.....

.....

..... bagaimana dengan tingkat global :

.....

.....

.....

.....

.....

UNIVERSITAS TERBUKA

**Program Kerja dan Pendanaan Menurut Bidang Urusan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Barat
Tahun Anggaran 2009**

Kode	Bidang Urusan	Sasaran Program/Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan (Bidang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Urusan Wajib				
A.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.951.332.700	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Proses surat menyurat	100	2.260.000	Sekretariat
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta telpon	Jasa rekening listrik, air, telpon kantor	100	84.648.000	Sekretariat
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peyediaan jasa administrasi keuangan	100	155.430.000	Sekretariat
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembiayaan jasa kebersihan kantor	100	6.000.000	Sekretariat
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pembiayaan jasa perbaikan alat kantor	100	16.500.000	Sekretariat
6	Penyediaan alat tulis kantor	Pembiayaan alat tulis kantor	100	56.944.700	Sekretariat
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pecetakan dan penggandaan	100	29.000.000	Sekretariat
8	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Pengadaan peralatan listrik dan penerangan kantor	100	13.725.000	Sekretariat
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembiayaan peralatan kantor	100	275.000	Sekretariat
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (3 penerbit / media)	Pembiayaan kerjasama media massa dalam peningkatan mutu pendidikan	100	110.250.000	Sekretariat
11	Penyediaan makanan dan minuman harian peg.	Pembiayaan makan minum	100	18.450.000	Sekretariat
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	100	89.525.000	Sekretariat
13	Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran	Pembiayaan jasa tenaga guru honor / GTT dan administrasi kantor	100	1.368.325.000	Sekretariat
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			991.860.000	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pembiayaan perlengk gedung	100	12.000.000	Sekretariat
2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100	95.350.000	Sekretariat
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas kantor	100	134.510.000	Sekretariat
4	Pembangunan KCD Lingsar		100	450.000.000	Sekretariat
5	Pengadana kendaraan operasional dinas		100	300.000.000	Sekretariat
			100		
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	5.000.000	
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pembiayaan pakaian kerja khusus	100	5.000.000	Sekretariat
			100		
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	25.000.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal fungsional	Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Sklh/Struktural	100	25.000.000	Sekretariat
			100		
E.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		100	18.560.000	
1	Penyusunan rencana program dan pelaporan	Rakorbang Prenc. / Monev Pndidikan	100	18.560.000	Sekretariat
F.	Program Pendidikan Anak Usia Dini		100	150.000.000	
1	Pengadaan APE / alat bermain perleng sekolah	Stimulan Pengadaan APE TK PAUD	100	100.000.000	Dikdas-PNFI

2	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan Kompetensi TP / TK Stimulan PAUD	100	50.000.000	Dikdas
			100		
G.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100	23.337.979.212	
1	Peningkatan Mutu dan Rehab bangunan sekolah	Rehab Gedung sekolah dan Mutu DAK	100	21.448.900.000	Dikdas
2	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	Pembiayaan pengembangan sekolah	100	1.097.354.712	Dikdas
3	Operasional TK, SLB SKB dan SMP	Operasional sekolah (rutin)	100	791.724.500	Dikdas
			100		
H.	Program Pendidikan Menengah		100	2.410.362.307	
1	Penambahan ruang Kelas sekolah	Stimulan pembangunan RKB	100	250.000.000	Dikmen
2	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (MP)	Pembiayaan pendidikan dan pelatihan	100	130.000.000	Dikmen
3	Pelatihan Penyusunan kurikulum SMA/SMK	Diversifikasi kurikulum berbasis life skill	100	107.170.500	Dikmen
4	Operasional SMA/SMK	Operasional SMA/SMK	100	975.251.250	Dikmen
5	Pembinaan Minat Bakat kreativitas siswa	Paskibra, Olimpiade Siswa, O2SN SD, O2SN SMP, O2SN SMA, LPI, FLS2N, POPDA, Festival Musik Tradisional dan Festifal Bahana Sura Pelajar	100	747.940.557	Dikmen dan POS
6	Pembangunan Ruang Bengkel SMK	Pembiayaan pembangunan ruang bengkel	100	200.000.000	Dikmen
			100		
I.	Program Pendidikan Non Formal		100	702.940.557	
1	Pengembangan pendidikan keaksaraan (A/B/C)	pendidikan keaksaraan	100	100.000.000	PNFI
2	Penuntasan Buta aksara	Penuntasan Buta Huruf 15-44 th	100	502.940.557	PNFI
3	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Pelatihan manajemen organisasi pemuda	100	100.000.000	PNFI
			100		
J.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan		100	862.682.511	
1	Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik	Peningkatan sertifikasi guru	100	115.000.000	Dikdas
2	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program	Pembiayaan pendataan perenc dan Eval program	100	672.682.511	Sekretariat
3	Pembinaan minat baca	Pembinaan Pustakawan sekolah	100	75.000.000	Dikmen
Jumlah				30.455.717.287	

Gerung, 25 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Barat,

Drs. H. RUMINDAH
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 130 388 280

13/40976

RENCANA PROGRAM BIDANG DIKDAS DIKPOR
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2010-2014

NO	RENCANA PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	VOLUME	JUMLAH ANGGARAN	APBD II
A	Pemerataan Dan Akses Pendidikan					
1	Sosialisasi wajar dikdas 9 th	meningkatkan pemahaman bagi masyarakat tentang wajar dikdas	seluruh lapisan masyarakat	6	160,000,000	√
2	Membangun USB dan RKB TK, SD dan SMP	mendekatkan pelayanan kepada peserta didik dan meningkatkan daya tampung anak	anak usia pra sekolah dan usia sekolah	8 USB TK	4,000,000,000	√
				6 USB SMP	72,000,000,000	√
				142 RKB SD	9,940,000,000	√
			97,280,000,000	162 RKB SMP	11,340,000,000	√
3	Rehab RKB TK	meningkatkan kenyamanan dan keamanan belajar	sekolah-sekolah yang rusak ringan atau berat.	40	1,000,000,000	√
4	Menambah fasilitas belajar di SD dan SMP	meningkatkan mutu proses pembelajaran dan	Lab. IPA,	8	1,000,000,000	√
			Lab. Bahasa,	8	1,000,000,000	√
			Ruang Multi media,	8	1,000,000,000	√
			Lab. PSB,	20	2,080,000,000	√
			Ruang Perpust. dan	323	33,915,000,000	√
			media pembelajaran lainnya	60	600,000,000	√
5	BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin)	meminimalisir angka putus sekolah (Dropout)	Siswa tidak Mampu	4 paket	5,200,000,000	
			44,795,000,000		143,235,000,000	
B	Efisiensi dan efektifitas					
1	Pengadaan alat-alat bermain TK	meningkatkan mutu proses pembelajaran	Permainan indor dan outdoor	40	1,000,000,000	√
2	Pengadaan Perangkat IT	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki perangkat IT	10	1,000,000,000	√
3	Pengadaan Alat-alat Laboraturium	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki	68	2,040,000,000	
4	Pengadaan Alat Bantu Sederhana	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki	40	200,000,000	√
5	Pengadaan Laboraturium Bahasa	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki	8	1,760,000,000	
6	Pengadaan Alat-alat Laboraturium IPA	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki	20	600,000,000	
7	Pengadaan Alat-alat Multimedia	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki	4	360,000,000	
8	Pengadaan Alat-alat PSB	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki	4	416,000,000	

	9	Pengadaan Perangkat Lunak Media Pembelajaran	meningkatkan mutu dan efisiensi pembelajaran	sekolah-sekolah yang belum memiliki	40	200,000,000	13/40976
						7,576,000,000	
C	Peningkatan Mutu Dan Relevansi						
	1	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru	meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik	guru-guru yang belum S1	3508	8,770,000,000	
	2	Peningkatan Kompetensi dan Skill Guru serta pengawas	meningkatkan kompetensi dan skill guru	semua guru	32	800,000,000	
	3	Pemberdayaan KKG dan MGMP	optimalisasi peran KKG dan MGMP	semua KKG dan MGMP	68	680,000,000	
	4	Pemberdayaan MKKS, KKKS, KKPS dan MKPS	meningkatkan peran pengawas dan kepek	Semua kepek dan pengawas	16	160,000,000	
	5	Memfasilitasi Pembentukan TK Model Percontohan	sebagai pusat pengembangan bagi TK di Lobar	TK-TK yang terakreditasi	4	200,000,000	
	6	Sertifikasi Guru	menjamin profesionalisme guru	guru-guru yang belum sertifikasi	4	100,000,000	
	7	Pemberdayaan Konsorsium	untuk meningkatkan koordinasi antar sekolah	sekolah anggota konsorsium	16	320,000,000	
	8	Implementasi Lesson Study	meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran	guru mapel	16	320,000,000	
	9	PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan)	guru memahami model pembelajaran pola PAIKEM	Semua guru	8 Gugus	480,000,000	
	10	Pemilihan Guru, Kepsek dan Pengawas, Laboran, dan Pustakawan Berprestasi	meningkatkan kompetisi guru dan kepek	guru dan kepek (TK,SD,SMP)	4	100,000,000	
	11	Lomba Karya Tulis Ilmiah, Fiksi dan Non Fiksi bagi Guru dan Kepsek	meningkatkan kemampuan menulis ilmiah	semua guru dan kepek	4	48,000,000	
	12	Kemitraan Kepsek	mempercepat kesetaraan antar sekolah	semua sekolah maju dan berkembang	16	160,000,000	
	13	Kontrak kerja program kepala sekolah dengan kepala dinas	untuk mengukur kinerja kepek	semua kepek	4	100,000,000	
	14	Pengembangan Kurikulum Terpadu	meningkatkan relevansi kurikulum dan dunia kerja	semua sekolah	4	180,000,000	
	15	Pemberdayaan tim pengembang kurikulum	optimalisasi peran fungsi TPK (Tim Pengembang Kurikulum)	anggota TPK	32	800,000,000	
	16	UN/ US SMP/ MTs dan UASBN/ UAS SD/ MI	mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik	Semua peserta didik	4 paket	1,100,000,000	
	17	Olimpiade science SMP			14,318,000,000	14,318,000,000	
D	Tata Kelola (Manajemen)						
	1	Pendampingan Implementasi MBS	untuk menjamin terlaksananya MBS	semua sekolah	8	200,000,000	
	2	Implementasi TQM (Total Quality Management)	mewujudkan standar pelayanan minimal	UPTD dan semua sekolah	4 Pket	260,000,000	
	3	Lomba Sekolah Sehat, Bersih dan Indah (TK, SD, SMP) (Masuk POS)	untuk menciptakan suasana sekolah yang sehat	semua sekolah	12	144,000,000	
	4	Pemberian Education Award	memberikan penghargaan bagi sekolah yang berprestasi	semua sekolah	4	400,000,000	
	5	Memfasilitasi Terwujudnya sekolah berstandar Internasional (SBI) dan sekolah standar Nasional (SSN)	memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik	sekolah SSN dan SBI	64	256,000,000	
	6	Pelaksanaan Akreditasi sekolah	meningkatkan standar pelayanan bagi peserta didik	semua sekolah	4	40,000,000	
	7	FGD (Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, stakeholder lainnya)	menyamakan persepsi kepek dengan komite dalam rencana pengembangan sekolah (RPS)	semua sekolah	4 gugus	200,000,000	
	8	Monitoring dan evaluasi program	mengukur ketercapaian semua program	semua program	4	60,000,000	

						13/40976
					1,560,000,000	
					166,689,000,000	

Mengetahui,
Kepala Dinas

33,337,800,000

30,455,717,287

2,882,082,713

Drs. H. Rumindah
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 130 388 288

UNIVERSITAS TERBUKA

SUMBER ANGGARAN			Strategi Pelaksanaan	INDIKATOR	KET.
APBD I	APBN	LAINNYA			
				terwujudnya pemahaman masyarakat tentang wajar dikdas	
√	√			tersediannya USB dan RKB yang memadai	
√	√				
√	√				
√	√				
√	√			terciptanya kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar	
√	√			terjadinya peningkatan mutu proses pembelajaran	
√	√				
√	√				
√	√				
√	√				
√	√			turunnya angka dropout	
√	√			tercapainya mutu proses	
√	√			tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	
√	√			tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	
				tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	
				tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	
				tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	
				tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	
				tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	

UNIVERSITAS TERBUKA

			tercapainya peningkatan mutu proses dan efisiensi pembelajaran	
			tercapainya kualifikasi tenaga pendidik	
			tercapainya kompetensi dan skill guru	
			meningkatnya peran KKG dan MGMP	
			meningkatnya peran kepek dan pengawas	
			tersedianya pusat pengembangan TK percontohan	
			terciptanya profesionalisme guru	
			terkoordinirnya kegiatan anatar sekolah	
			terciptanya peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran	
			terciptanya model pembelajaran PAKEM bagi guru	
			tercapainya kompetisi antar guru dan kepek	
			terciptanya kemampuan guru dan kepek dalam menulis ilmiah	
			Tercapainya kesetaraan mutu antar sekolah	
			terpetakannya kinerja kepek	
			tersedianya kurikulum terpadu	
			meningkatnya peran dan fungsi TPK	
			terlaksananya UN dan UASBN	
			terlaksananya MBS di sekolah	
			tercapainya standar pelayanan minimal	
			terciptanya suasana sekolah yang sehat	
			termotifasinya sekolah untuk meningkatkan prestasi	
			tersedianya SSN dan SBI	
			tercapainya standar pelayanan yang memadai bagi	
			terciptanya kesamaan persepsi kepek dengan komite dalam penyusunan RPS	
			terukurnya ketercapaian semua program DIKDAS	

UNIVERSITAS TERBUKA

Kabid Dikdas,

Ilham, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
Nip.

UNIVERSITAS TERBUKA